

LKJIP

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

2025



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Blitar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas terselesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 sebagai upaya mengukur tingkat kinerja, dasar perbaikan dokumen perencanaan yang berkesinambungan serta sebagai upaya pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar yang telah direncanakan dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 ini merupakan gambaran dari hasil-hasil yang dicapai berdasarkan kinerja utama dan/atau sasaran strategis dengan dukungan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Blitar berdasarkan kewenangan masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Sasaran yang belum tercapai menggambarkan bahwa belum terfokusnya kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025 sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman Rencana Strategis, sehingga kekurangan tersebut kedepan akan diperbaiki melalui peningkatan kinerja dengan mempedomani dokumen Rencana Strategis yang telah disepakati. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Perangkat Daerah lain juga akan ditingkatkan sehingga hasil perumusan kebijakan Kepala Daerah dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dalam peningkatan kinerja Perangkat Daerah serta kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 disampaikan terima kasih dan semoga kedepan kinerja

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

Sekretariat Daerah Kota Blitar pada khususnya dan Pemerintah Kota Blitar pada umumnya dapat ditingkatkan lagi sesuai dengan komitmen dan amanah yang telah diberikan.

Blitar, 27 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH

PRIYO SUHARTONO, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196712241989031005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 sebagai Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016, dimana Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang memiliki tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat pasal 3, bahwasanya dalam menjalankan tugas tersebut Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan serta melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang turut berperan aktif dalam mewujudkan Visi **“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”** dengan menjalankan Misi ke-1 yaitu Meningkatkan tata kehidupan yang religius, nasionalis, setara gender dan berkepribadian dalam kebudayaan serta Misi ke-5 yaitu Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021 – 2026 yang diampu oleh Sekretariat Daerah dijelaskan dalam tabel berikut :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra
1	Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan
2	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan
			2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	2. Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi
			3. Meningkatkan tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik
				Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Sebagai operasionalisasi tujuan dan sasaran agar bisa diukur dan dipantau secara berkala, maka telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Blitar sebagaimana dalam **lampiran III LKj IP** ini.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja sasaran strategis, berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran 2025 oleh masing-masing Bagian dari dana APBD Kota Blitar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Jumlah anggran pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

1. Belanja Operasional : Rp. 43.569.222.806,00
2. Belanja Modal : Rp. 1.330.973.736,00 +
Jumlah : Rp. 44.900.196.542,00

Adapun penggunaan anggaran tersebut diperuntukkan sebagai upaya guna mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Blitar, yang dituangkan dalam 4 (empat) program yaitu :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Program Perekonomian dan Pembangunan
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan realisasi anggaran per sasaran strategis sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	ANGGARAN		
		Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	8.959.037.836,00	8.708.678.844,00	97,21%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA)	8.959.037.836,00	8.708.678.844,00	97,21%
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	3.993.115.118,00	3.641.865.767,00	91,20%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (BAGIAN PEMERINTAHAN)	1.845.936.890,00	1.731.796.445,00	93,82%
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	22.000.000,00	21.450.000,00	97,50%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	ANGGARAN		
		Alokasi	Realisasi	Capaian
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (BAGIAN HUKUM)	709.040.840,00	672.365.233,00	94,83%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA)	292.500.069,00	197.121.512,00	67,38%
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA)	617.649.630,00	542.189.514,00	87,78%
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA)	505.987.689,00	476.923.063,00	94,26%
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	339.303.203,00	338.118.431,00	99,65%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	339.303.203,00	338.118.431,00	99,65%
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	15.266.933.033,99	14.739.469.191,00	96,55%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BAGIAN	235.039.812,00	198.735.613,00	84,55%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	ANGGARAN		
		Alokasi	Realisasi	Capaian
	ORGANISASI)			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BAGIAN UMUM)	15.031.893.221,99	14.540.733.578,00	96,73%
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	16.341.807.351,01	15.029.784.205,00	91,97%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BAGIAN ORGANISASI DAN BAGIAN UMUM)	16.341.807.351,01	15.029.784.205,00	91,97%

Dari realisasi anggaran tersebut diatas dan disandingkan dengan capaian kinerja Sekretariat Daerah maka akan menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis 1: **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan”** capaian kinerja tahun 2025 sebesar 116,67% atau Sangat Berhasil dengan tingkat efisiensi sebesar 1,20 karena untuk mencapai kinerja sebesar 116,67% diperlukan capaian anggaran sebesar 97,21%. Tingkat efisiensi ini didukung adanya kepedulian Pemerintah Daerah yang sangat besar terhadap terwujudnya keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama ditengah-tengah aktifitas keagamaan masyarakat
- 2) Sasaran Strategis 2: **“Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan”** capaian kinerja tahun 2025 sebesar

109,09% atau Sangat Berhasil dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,20 karena untuk mencapai kinerja sebesar 109,09% hanya diperlukan capaian anggaran sebesar 91,20%. Keberhasilan ini didukung adanya faktor pendorong antara lain:

1. Rumusan Kebijakan Pemerintahan

(1) adanya keterlibatan kampus/ perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi tepat guna di Kota Blitar (2) koordinasi yang intensif dengan *stake holder* dan Perangkat Daerah terkait urusan kewilayahan (3) kerjasama dan koordinasi yang sinergi dengan Perangkat Daerah selaku penyedia dan penyusun data capaian kinerja (4) kepedulian perangkat kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya pada administrasi pemberdayaan masyarakat (5) Aplikasi E-LPPD Kota Blitar yang membantu penginputan data capaian kinerja Perangkat Daerah.

2. Rumusan Kebijakan Perekonomian

(1) Langkah-langkah revitalisasi struktur dan kultural manajemen BUMD (Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar) (2) Potensi UKM, IKM dan Ekraf Kota Blitar cukup menjadi modal dan didukung dengan agenda tahunan Kota Blitar (event) yang semakin digiatkan oleh Perangkat Daerah pelaksana

3. Rumusan Kebijakan Administasi Pembangunan

(1) Tata kelola penyusunan kebijakan dan pengadaan barang/jasa yang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (2) Koordinasi antar lembaga baik vertikal maupun antar OPD intensif dilaksanakan (3) Monev pembangunan yang rutin dilaksanakan per tribulannya

3) Sasaran Strategis 3, “**Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi**”, capaian kinerja tahun 2025 adalah 100% atau Sangat Berhasil, dengan tingkat efisiensi sebesar 1,00 karena untuk mencapai kinerja sebesar

100% diperlukan capaian anggaran sebesar 99,65%. Tingkat efisiensi ini didukung oleh adanya: (1) Pembinaan yang kontinu terhadap penerapan reformasi birokrasi pada seluruh Perangkat Daerah baik melalui sosialisasi, internalisasi, pendampingan, desk, coaching dan sharing bersama terkait pemecahan masalah penerapan dan monev pelaksanaan reformasi birokrasi (2) Integrasi aplikasi manajemen kinerja

- 4) Sasaran Strategis 4: **“Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik”** capaian kinerja tahun 2025 adalah 96,70% atau Sangat Berhasil dengan tingkat efisiensi sebesar 1,00 karena untuk mencapai kinerja sebesar 96,70% diperlukan capaian anggaran sebesar 96,55%. Tingkat efisiensi ini didukung oleh komitmen Pimpinan Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan berpedoman pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, salah satunya penerapan Standar Pelayanan, pelaksanaan dan penyusunan laporan SKM perangkat daerah berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 serta menindaklanjuti rekomendasi dari hasil SKM perangkat daerah tepat waktu dan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.
- 5) Sasaran Strategis 5: **“Meningkatnya kinerja perangkat daerah”** dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 89,00 terealisasi 86,37 sehingga menghasilkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,06 dan dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 97,04% membutuhkan capaian anggaran sebesar 91,97%. Hal ini diartikan belum berhasil dalam memenuhi target sehingga kedepan perlu adanya prioritas penyelesaian dari permasalahan-permasalahan dalam implementasi SAKIP Perangkat Daerah terutama menindaklanjuti LHE SAKIP dari Inspektorat Daerah, serta lebih menguatkan komitmen masing-masing pimpinan unit kerja di lingkup Sekretariat Daerah dalam memahami konsepsi perencanaan, pengukuran target kinerja serta

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

implementasi SAKIP berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Maksud dan Tujuan	23
D. Dasar Hukum	23
E. Aspek-Aspek Strategis	26
F. Isu-Isu Strategis	27
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	29
A. Rencana Strategis	29
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	31
C. Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKj IP Tahun 2024	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	52
A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran	53
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2025	54
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 – 2025	75

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir Periode Renstra	82
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional atau Provinsi atau Kabupaten/Kota	84
B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)	87
C. Prestasi/Penghargaan	106
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Langkah Perbaikan	109
LAMPIRAN- LAMPIRAN	I
LAMPIRAN I MATRIKS PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026	L-I
LAMPIRAN II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN TAHUN 2025	L-VI
LAMPIRAN III PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 ...	L-XXVII
LAMPIRAN IV PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	L-XXX

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Blitar guna mencapai Urusan Penunjang serta Usan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menurut Pangkat dan Golongan, Tingkat Pendidikan, Pejabat Struktural/Fungsional	21
Tabel 2.1	Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah	33
Tabel 2.2	Target Kinerja Utama dan/atau Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025	36
Tabel 2.3	Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKj IP Sekretariat Daerah Tahun 2024	38
Tabel 3.1	Tabel Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025	55
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2023 sampai Tahun 2025	76
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 sampai dengan akhir Periode Renstra 2021 – 2026	83
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Setda Kota Blitar dengan Realisasi Kinerja Setda Kabupaten Trenggalek Tahun 2025	85
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	88
Tabel 3.6	Tabel Alokasi Anggaran per Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2025	93
Tabel 3.7	Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025	94
Tabel 3.8	Tabel Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	100

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

Tabel 4.1 Rencana Tindak Lanjut LKj IP Sekretariat Daerah Tahun 2025
.....109

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD). Dalam penyusunan pelaporan kinerja, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 ini disusun untuk mengukur kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu, melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) dapat digunakan sebagai upaya perbaikan bagi Sekretariat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya serta sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar Tahun 2025. Perencanaan program dan kegiatan yang dimaksud tersusun dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2021-2026, Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 dan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 yang secara operasional dilaksanakan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disempurnakan dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

Dengan mengedepankan prinsip-prinsip jujur, obyektif, akurat dan transparan, sistem pengukuran kinerja yang disajikan dilakukan melalui pengumpulan data untuk menilai kinerja, menganalisis, mereview dan melaporkan kinerja. Adapun hasil dari laporan capaian kinerja tersebut dipergunakan untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya. Mekanisme pengukuran kinerja yang dilakukan yaitu membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator sub kegiatan sampai kepada sasaran. Adapun penentuan bobot antar indikator sub kegiatan, kegiatan dan program dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing perannya dalam mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam Perencanaan Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pelaksanaan tugas pokok fungsi sekretariat daerah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang memiliki tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sesuai dengan amanat pasal 3 Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1. Bagian Pemerintahan;
 - 2. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 - 3. Bagian Hukum;
- c. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum terdiri dari:
 - 1. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2. Bagian Organisasi;
 - 3. Bagian Umum membawahi Sub Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol.

Fungsi dari masing-masing jabatan di Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah:

- 1. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah dan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan, fasilitasi dan pengendalian sekaligus melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemerintah daerah pada Bagian Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Hukum serta mengkoordinasikan perumusan kebijakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, transmigrasi, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pendidikan, kesehatan, sosial, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, koperasi dan UKM, kepemudaan dan olah raga, pariwisata, kebudayaan, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan urusan penunjang kepegawaian dan sumber daya manusia, pengawasan serta BUMD dan koordinasi kerukunan umat beragama.

Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum serta perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum serta perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemerintahan, hukum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan, hukum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Kepala Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama.

Untuk menjalankan tugas dimaksud Bagian Pemerintahan melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian administrasi pemerintahan, sub bagian administrasi kewilayahan dan sub bagian otonomi daerah dan kerja sama;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama;
- d. penyiapan baban pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

kecamatan dan kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Sekretaris Daerah;

- e. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal daerah;
- f. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kota;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama;
- i. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

- a. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsi :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

- c. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian perekonomian, sub bagian bina mental spiritual dan sub kesejahteraan sosial dan masyarakat;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- e. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- f. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, sosial, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, ketenagakerjaan, transmigrasi, perlindungan perempuan dan anak, keluarga berencana, koperasi dan UMKM, pemuda dan olahraga, perpustakaan, Kearsipan, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, ESDM, perdagangan, dan perindustrian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Sekretaris Daerah;
- g. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- i. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Kepala Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Hukum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian perundang-undangan, sub bagian bantuan hukum dan sub bagian dokumentasi dan informasi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- e. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

6. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum

Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan, fasilitasi serta pengendalian sekaligus melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemerintah daerah pada bagian Umum, Organisasi, dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa serta mengkoordinasikan perumusan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, ESDM, dan urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan serta fasilitasi pimpinan dan forum pimpinan daerah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
- b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi, umum, yang berkaitan dengan tugasnya.

7. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan serta menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian penyusunan dan pengendalian program, sub bagian pengadaan barang / jasa, sub bagian LPSE;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang/ jasa;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang/ jasa;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, dan urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang / jasa;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang/ jasa;
- g. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perkembangan kemajuan / progres pelaksanaan pembangunan daerah;
- h. Pengoordinasian pendokumentasi kegiatan pembangunan daerah;
- i. Pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- j. Pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- k. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- l. Pelaksanaan penugasan Pejabat Pengadaan Barang /Jasa di lingkungan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pengadaan langsung di satuan kerja/organisasi perangkat daerah atas permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- m. Pelaksanaan penugasan anggota Pokja Pemilihan untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

barang/jasa dan fungsi penyusunan dan pengelolaan katalog lokal;

- n. Penyusunan dan penyampaian laporan periodik seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Walikota;
 - o. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang dan jasa; dan
 - p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum yang berkaitan dengan tugasnya.
8. Kepala Bagian Organisasi

Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian Organisasi yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian analisis jabatan dan kelembagaan, sub bagian pelayanan publik dan tata laksana, serta sub bagian kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kepegawaian, kelembagaan dan analisis jabatan,

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;

- e. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- g. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

9. Kepala Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan serta evaluasi di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, dan tata usaha pimpinan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian rumah tangga dan perlengkapan, sub bagian komunikasi pimpinan dan protokol dan sub bagian tata usaha pimpinan dan keuangan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan keuangan di lingkungan sekretariat daerah;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

- c. Penyiapan bahan pengoordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan keuangan di lingkungan sekretariat daerah;
- d. Pelaksanaan sosialisasi, konsultasi penyelenggaraan urusan di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan keuangan di lingkungan sekretariat daerah;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan keuangan di lingkungan sekretariat daerah;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan staf ahli; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Didalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Bagian Umum membawahi Sub Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol, yang melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan sub bagian komunikasi pimpinan dan protokol;
- b. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria bidang komunikasi pimpinan dan protokol;
- c. Menjalin hubungandengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah;
- d. Memberi masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian informasi tertentu;
- e. Memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak- pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

- f. Menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. Menyusun naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- h. Melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
- j. Menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- k. Melaksanakan pengumpulan dan analisa informasi dan berita daerah;
- l. Menyusun rencana tata tempat rapat, tata upacara dan tata penghormatan serta pertemuan kedinasan lainnya;
- m. Menyediakan kelengkapan dan peralatan rapat/pertemuan kedinasan lainnya yang menjadi ruang lingkupnya;
- n. Menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- o. Menyelenggarakan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah dan sekretariat daerah;
- p. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi di bidang komunikasi pimpinan dan protokol;
- q. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam struktur organisasi Sekretariat Daerah berdasarkan Perwali Nomor 57 Tahun 2022, selain terdapat pejabat struktural, juga terdapat pejabat fungsional yang bertugas untuk melaksanakan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

tugas spesialis atau keahlian tertentu, dengan penjelasan jabatan fungsional yang ada di Sekretariat Daerah sebagai berikut:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Sekretaris Daerah
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya
- d. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan
- e. Jabatan fungsional diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Tahun 2025 merupakan tahun kelima pelaksanaan tahapan penyederhanaan birokrasi, dimana prosesnya diawali di tahun 2021 yaitu dengan telah dilaksanakannya perampingan struktur organisasi eselon IV dan penyetaraan jabatan eselon IV ke jabatan fungsional. Perubahan ini tentunya akan berdampak terhadap tata kerja dan mekanisme kerja seluruh perangkat daerah yang ada termasuk dalam hal ini Sekretariat Daerah, semula terdapat eselon IV maka dialihkan ke jabatan fungsional, dikecualikan satu eselon IV yang ada di Bagian Umum yang memiliki tugas pokok fungsi mengenai keprotokoleran pimpinan daerah. Dengan adanya perubahan eselon IV menjadi fungsional, maka tata kerja dan mekanisme pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah sebagai berikut:

A. TATA KERJA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris Daerah, pejabat struktural serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- 2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan.
- 3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- 4) Setiap pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- 5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

B. MEKANISME KERJA

- 1) Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah, Sekretaris Daerah memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahannya dengan memperhatikan saran dan telaahan staf

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

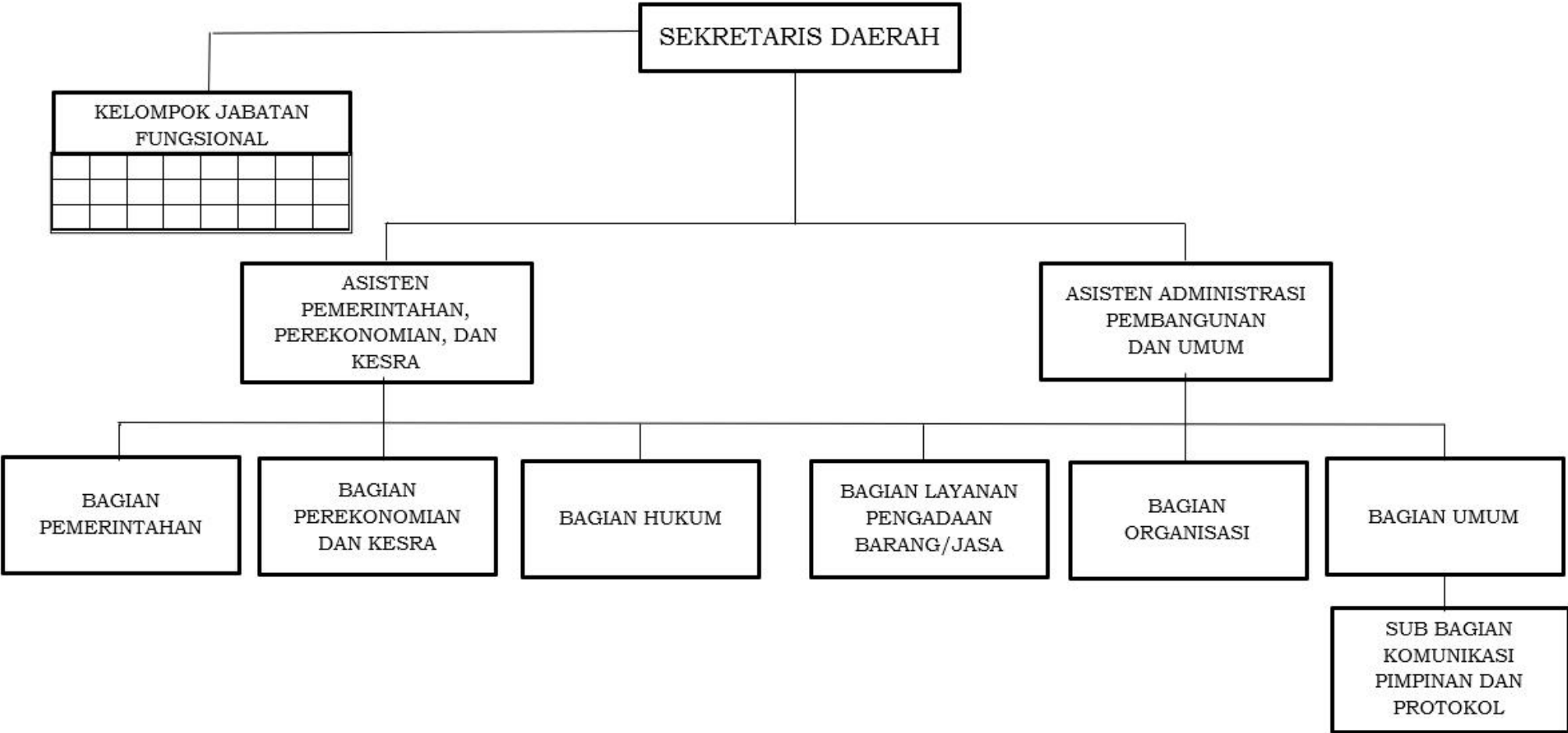
- 2) Dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan mengintegrasikan perencanaan serta pelaksanaan kegiatan kepala bagian, Sekretaris Daerah dibantu oleh asisten yang ada dibawahnya
- 3) Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Sekretaris Daerah melalui asisten sesuai pembagian kewenangan. Selain itu, kepala bagian memberikan arahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahan masing-masing
- 4) Sekretaris Daerah membuat surat tugas atau penugasan kepada pejabat fungsional (eselon IV yang disetarakan menjadi pejabat fungsional) untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok fungsinya semula atau lintas bagian. Dalam melaksanakan kegiatan, pejabat fungsional yang diberikan penugasan oleh Sekretaris Daerah, bertanggung jawab langsung kepada atasan langsung masing-masing dalam hal ini kepala bagian.
- 5) Penugasan sebagaimana dimaksud diatas bersifat mendukung pelaksanaan tugas fungsi sekretariat daerah
- 6) Penugasan yang dimaksud di atas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan dengan hasil kegiatan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian masing-masing
- 7) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan berkonsultasi kepada kepala bagian serta memberikan pengarahan, perintah dan petunjuk kepada bawahan masing-masing
- 8) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan penunjukan dan surat tugas dari Sekretaris Daerah sekaligus melaporkan hasil pekerjaannya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian selaku penilai kinerja

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

- 9) Setiap Pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerja secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Untuk memberikan gambaran pola koordinasi antar jabatan pada Sekretariat Daerah dapat terlihat dalam Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Sekretariat Daerah didukung oleh 104 (seratus empat) personil untuk pencapaian 2 (dua) urusan. Adapun penggolongan pegawai disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Blitar guna mencapai
Urusan Penunjang serta Urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menurut Pangkat dan
Golongan, Tingkat Pendidikan, Pejabat Struktural/Fungsional

No	Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan, Jabatan Struktural/Fungsional	Jenis Kelamin (Orang)			Ket
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
I	Pangkat/Golongan				
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	0	1	
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	2	0	2	
3.	Pembina Tk.I (IV/b)	4	0	4	
4.	Pembina (IV/a)	2	1	3	
5.	Penata Tk.I (III/d)	4	9	13	
6.	Penata (III/c)	2	1	3	
7.	Penata Muda Tk.I (III/b)	9	9	18	
8.	Penata Muda (III/a)	18	20	38	
9.	Pengatur Tk.I (II/d)	0	1	1	
10.	Pengatur (II/c)	6	1	7	
11.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	0	1	1	
12.	Pengatur Muda (II/a)	1	0	1	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan, Jabatan Struktural/Fungsional	Jenis Kelamin (Orang)			Ket
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
13.	Juru Tk.I (I/d)	0	0	0	
14.	PPPK	3	9	12	
15.	PTT	0	0	0	
	Jumlah	53	52	104	
II	Tingkat Pendidikan				
1	Pasca Sarjana (S2)	8	4	12	
2	Sarjana (S1/DIV)	27	33	60	
3	Diploma	5	5	10	
4	SMA	9	11	20	
5	SMP	1	0	1	
6	SD	1	0	1	
	Jumlah	52	53	104	
III	Jabatan Struktural/ Fungsional				
1	Pejabat Struktural	9	2	11	
2	Pejabat Fungsional Khusus	15	18	33	
3	Pejabat Fungsional Umum	27	33	60	
	Jumlah	52	53	104	

Data Kepegawaian per 31 Desember 2025

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2025 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar pada Tahun 2025, dengan tujuan:

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan serta kinerja periode yang akan datang;
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*clean government*), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2025 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026;
20. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
23. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

E. Aspek-Aspek Strategis

Sebagai unsur penunjang, Sekretariat Daerah memiliki aspek-aspek strategis yang dapat menunjang dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, diantaranya sebagai berikut:

1. Perumus kebijakan umum yang mendukung Walikota dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang dituangkan kedalam Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, Surat Edaran Walikota serta segala bentuk kebijakan daerah untuk mengarahkan seluruh perangkat daerah;
2. Pembina dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
3. Pengendali penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
4. Pembina administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Daerah;
5. Perangkat daerah yang memiliki kewenangan memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

F. Isu-Isu Strategis

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah terdapat isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun isu-isu strategis tersebut yaitu:

1. Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi pada seluruh Perangkat Daerah di Kota Blitar termasuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara masif di kalangan ASN
2. Manajemen kinerja belum terintegrasi secara optimal dalam mendukung budaya kerja ASN ber-AKHLAK
3. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Perangkat Daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku
4. Belum optimalnya implementasi sistem kerja ASN sesuai dengan PermenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
5. Belum optimalnya pelaksanaan transformasi digitalisasi pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
6. Belum optimalnya data administrasi pembangunan untuk mendukung proses perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan
7. Belum optimalnya pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan Sekretariat Daerah, hal ini mutlak dilakukan karena merupakan pelayanan yang pertama berhadapan dengan masyarakat atau perangkat daerah lain
8. Perlunya adaptasi peningkatan layanan persuratan dan arsip melalui aplikasi SRIKANDI guna mendukung digitalisasi tata kelola arsip pemerintahan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

9. Perlunya implementasi dan monitoring pelaksanaan kerja sama daerah dalam mendukung kinerja Pemerintah Daerah
10. Belum tersedianya roadmap perencanaan bisnis bagi Perumda Tirta Patria, sehingga kajian dalam peningkatan usaha Perumda Tirta Patria belum dapat dilakukan
11. Alur pengelolaan dana DBHCHT yang perlu dikaji ulang sehingga proses pembagian dan pelaporan DBHCHT dapat lebih efektif
12. Perlunya optimalisasi monitoring dan evaluasi kebijakan Ekonomi Mikro Kecil
13. Belum optimalnya ketersediaan data – data yang sistematis dan akurat sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan
14. Belum optimalnya penyelenggaraan bantuan hukum bagi internal ASN Pemerintah Kota Blitar.
15. Belum optimalnya pemanfaatan WA Sender JDIH sebagai sumber informasi produk hukum daerah.
16. Lamanya proses fasilitasi Peraturan Daerah menyebabkan pemenuhan penyelesaian Propemperda tahun berjalan menjadi kurang maksimal.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan sangat dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Tanpa adanya perencanaan, sesuatu yang dilakukan pasti tidak akan terstruktur dan akan menjadi kegiatan yang berantakan karena tidak adanya persiapan apa pun. Dengan adanya perencanaan, maka akan dapat dirinci daftar kebutuhan dan konsep terkait kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Perencanaan yang matang adalah kunci keberhasilan dari suatu kegiatan. Perencanaan merupakan salah satu alat dalam proses manajemen yang digunakan mengelola kondisi saat ini untuk dilakukan di masa depan atau di masa yang akan datang. Perencanaan strategis sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan dalam jangka waktu panjang, menengah maupun pendek.

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai target yang ditetapkan. Berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini seperti analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), PEST (Political, Economic, Social, Technological), atau STEER (Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory).

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dibagi menjadi tiga yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Masing-masing perencanaan merupakan pelaksanaan perencanaan ditingkat yang lebih tinggi, seperti jangka menengah merupakan penjabaran dari jangka panjang dan jangka pendek merupakan penjabaran dari jangka menengah. Perencanaan jangka menengah, dengan kurun waktu 5 (lima) tahun, lebih familiar kita kenal

dengan perencanaan strategis yang merupakan akumulasi janji-janji politik kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam proses kampanye yang disusun berdasarkan pendekatan secara teknokratik, akademis dan politik yang harus dilakukan oleh pasangan terpilih beserta perangkat daerah sebagai pembantu pimpinan daerah dalam mewujudkan janji-janji politik yang telah menjadi dokumen perencanaan jangka menengah.

Berdasarkan janji politik kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, maka telah ditetapkan Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 adalah: **“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”**. Untuk mewujudkan serta mengoperasionalkan visi tersebut, maka terdapat misi yang menjadi pedoman serta arah pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, yaitu:

1. **Meningkatkan tata kehidupan yang religius, nasionalis, setara gender dan berkepribadian dalam kebudayaan**
2. **Meningkatkan sumber daya manusia yang keren, berdaya saing, sehat jasmani-rohani, cerdas dan berkarakter**
3. **Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital**
4. **Meningkatkan infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan hidup dan berkeadilan**
5. **Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi**

Sekretariat Daerah sebagai unsur penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan serta melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berperan aktif dalam mewujudkan Visi dan Misi ke-1 dan ke-5 Kota Blitar yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Guna

mewujudkan visi dan misi tersebut maka disusunlah rencana strategis Sekretariat Daerah untuk Tahun 2021-2026 dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2025 yang harus dipedomani bagi setiap ASN dilingkungan Sekretariat Daerah. Dalam mengoperasionalkan dokumen renstra ini maka harus mempertimbangkan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan dengan memperhitungkan capaian target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 secara terperinci sebagaimana dalam Lampiran I LKj IP Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 yaitu Matriks Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh setiap unsur yang ada di Sekretariat Daerah Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Penyusunan rencana kinerja Tahun 2025 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian kinerja tahun 2025 juga merupakan penjabaran dari sasaran dan program tahun kedua pasca masa transisi yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

Perjanjian kinerja tahun 2025 tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh **indikator sasaran perangkat daerah serta Indikator Kinerja Utama (IKU)** yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah dan/atau Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan x 100 %	Bagian Perekonomian dan Kesra	Laporan monev rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100 %	- Bagian Pemerintahan - Bagian Perekonomian dan Kesra	Laporan monev rumusan kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan/Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum x 100%	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan monev rumusan kebijakan administrasi pembangunan yang diimplementasikan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	Jumlah OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik) dibagi jumlah seluruh OPD x 100%	Bagian Organisasi	Laporan monev atas penerapan area perubahan reformasi birokrasi pada OPD Pemerintah Kota Blitar
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	Jumlah OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM pada tahun bersangkutan / Jumlah OPD x 100%	Bagian Organisasi	Laporan monev tindak lanjut OPD atas hasil SKM pada tahun bersangkutan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	Jumlah inovasi tahun $n - \text{tahun } n - 1$ dibagi inovasi tahun $n - 1 \times 100\%$ (penghitungan akumulasi didasarkan pada): 1. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat/pengguna layanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.	Bagian Organisasi	Laporan pembinaan dan monitoring evaluasi inovasi pelayanan publik Perangkat Daerah
		Nilai rata - rata SKM Setda	(Nilai SKM layanan pada Bagian Pemerintahan + Nilai SKM layanan pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat + Nilai SKM layanan pada Bagian Hukum + Nilai SKM layanan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa + Nilai SKM layanan pada Bagian Organisasi + Nilai SKM layanan pada Bagian Umum) / 6	Seluruh Bagian	Laporan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun bersangkutan
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	Bagian Organisasi	LHE SAKIP Perangkat Daerah dari Inspektorat Daerah Kota Blitar

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

Taget Kinerja Utama dan/atau Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Target Kinerja Utama dan/atau Sasaran
Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar
Tahun 2025

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100%
		2. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	86,21%
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	100%
		2. Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	39,13%
		3. Nilai rata - rata SKM Setda	Sangat Baik (89)
5	Meningkatnya kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
	perangkat daerah		(89,00)

Perjanjian kinerja pada Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 ada 3 tingkatan yaitu:

1. Perjanjian Kinerja Eselon II terdiri dari :
 - a. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yakni Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Blitar dengan Walikota Blitar;
 - b. Perjanjian Kinerja Asisten dengan Sekretaris Daerah Kota Blitar;
2. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III yakni Perjanjian kinerja Kepala Bagian dengan Asisten yang membidangi;
3. Perjanjian Kinerja Pejabat Setara Eselon IV atau Pejabat Fungsional yang diberi kewenangan melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan dengan Kepala Bagian;

Untuk perjanjian kinerja Sekretaris Daerah Kota Blitar dengan Walikota Blitar yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian kinerja organisasi terdapat dalam Lampiran III LKj IP 2025. Adapun Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 secara terperinci sebagaimana dalam Lampiran II LKj IP Sekretariat Daerah Tahun 2025.

C. Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKj IP Tahun 2024

Sebagai bentuk keberlanjutan atas pencapaian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2024, maka sudah ditetapkan langkah-langkah perbaikan dalam rangka pencapaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya atas kendala atau permasalahan yang dihadapi. Guna mengetahui progress langkah-langkah perbaikan tersebut, maka perlu kami laporkan hasilnya sebagai berikut:

Tabel 2.3
Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKj IP Sekretariat Daerah
Tahun 2024

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
1	Perlunya komitmen bersama dan persamaan persepsi antar stakeholder terkait implementasi kebijakan bidang keagamaan	Menyusun dan memonev rumusan kebijakan bidang bina mental spiritual masyarakat secara berkala	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	✓		Melaksanakan monev ke kelompok masyarakat dan lembaga keagamaan sasaran penerima hibah pada triwulan III
		Mensosialisasi kan kebijakan yang mendukung pembinaan mental spiritual masyarakat	- Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	✓		Membuat surat edaran keagamaan (safari Ramadhan, pelaksanaan kegiatan masyarakat saat Ramadhan) yang dapat diakses oleh seluruh OPD dan masyarakat pada triwulan I
		Koordinasi lintas sektor atau antar stakeholder yang intensif guna penguatan komitmen dan penyamaan persepsi terkait implementasi kebijakan bidang keagamaan		✓		Melaksanakan rapat koordinasi stakeholder keagamaan (guru ngaji, guru minggu, FKUB, dan Kemenag) setiap triwulan
2	Waktu perubahan pedoman RT Keren yang	Melakukan sosialisasi Perubahan Perwali RT	- Program Pemerintahan dan	✓		- Telah dilaksanak an sosialisasi perubahan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
	terlalu berhimpitan dengan perencanaan anggaran	Keren	Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan - Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			pedoman RT Keren pada Bulan Agustus 2025 dengan sasaran perangkat kecamatan dan kelurahan - Kecamatan menindaklanjuti hasil sosialisasi perubahan pedoman RT Keren ke pokmas di wilayah masing-masing
	Waktu penyusunan pedoman persewaan aset sangat terbatas mengingat bersamaan dengan tahapan pelaksanaan persewaan aset	Melaksanakan persewaan aset menggunakan SE Juknis		√		Pada awal tahun 2025 pelaksanaan pembayaran persewaan aset menggunakan SE juknis yang telah disesuaikan dengan draft Perwali persewaan aset sampai Perwali Persewaan aset diterbitkan pada bulan Oktober 2025
	Pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) digabung menjadi satu dalam Perwali LKK sehingga pengaturan masing-masing LKK kurang	Melaksanakan evaluasi pengaturan LKK dalam 3 bulan kedepan (tribulan 1 tahun 2025) sebagai bahan rewiu apabila tidak sesuai dengan			√	Belum dilakukan pada tahun 2025 terkendala efisiensi sehingga akan dijadwalkan ulang pada tahun 2026

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
	detail dan masih banyak permasalahan LKK yang belum diatur	kondisi				
	Penyesuaian Perwali Posyandu dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 kurang berjalan optimal karena waktu yang berhimpitan dengan berakhirnya tahun anggaran 2024	Menunggu Perwali Posyandu berproses pelaksanaan LKK Posyandu menggunakan SE Juknis		√		Pembentukan LKK Posyandu menggunakan SE juknis yang telah disesuaikan dengan draft Perwali LKK Posyandu sedangkan pengelolaan LKK posyandu sudah menggunakan Perwali LKK posyandu yang telah ditetapkan pada bulan Juli 2025
3	Pemilihan ibukota Kecamatan Sukorejo saat ini kurang strategis, kurang terjangkau publik, kurang bisa menghubungkan dengan wilayah-wilayah lain di sekitar serta kurang aman terhadap situasi bencana	Pemindahan ibu kota Kecamatan Sukorejo ke Kelurahan Pakunden, tentunya harus ditetapkan dalam peraturan daerah	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan - Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan		√	Sampai dengan akhir tahun 2025 PERDA Pemindahan Ibu Kota Kecamatan belum ditetapkan
4	Belum adanya peta kebijakan kesejahteraan rakyat yang bisa mendukung langsung pencapaian tujuan kesejahteraan	Lebih intensif melakukan koordinasi kepada instansi vertikal sebagai Pembina Bagian Perekonomian	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan	√		Melaksanakan rapat koordinasi bersama OPD terkait (Dinkes, Dinas Pendidikan dan Pesantren) tentang sekolah sehat

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
	sosial dan masyarakat	dan Kesejahteraan Rakyat serta meningkatkan koordinasi lintas OPD guna memfasilitasi perumusan kebijakan yang menjadi kewenangannya meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB serta Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas.	Rakyat - Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial			dan pesantren tanggap bencana, pada triwulan II
5	Perlunya komitmen bersama dan persamaan persepsi antar stakeholder terkait implementasi rumusan kebijakan	Menyusun dan mensosialisasikan kebijakan yang mendukung kegiatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat		✓		Membuat aturan seperti, Perwali tentang Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
	bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat					disosialisasikan kepada masyarakat pada triwulan III
6	Belum maksimalnya kinerja BUMD akibat kekosongan jabatan direktur	Melakukan percepatan restrukturisasi melalui penetapan Organ BUMD dengan penguatan komitmen melalui perjanjian kinerja dan penerapan ketentuan Perda yang menjadi dasar penyelenggaraan BUMD	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	✓		Sudah melakukan open rekrutmen direktur dan sudah dilantik pada triwulan I baik BPR maupun PDAM
7	Kurang optimalnya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD serta Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Optimalisasi Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD serta Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		✓		Sudah dilakukan rapat koordinasi dan tatap muka langsung dengan Walikota Blitar membahas kinerja BUMD pada triwulan IV
8	Aplikasi E-Monev belum dapat terintegrasi dengan SIPD RI, sehingga Realisasi Pengadaan Barang/Jasa belum dapat	Melakukan pemeliharaan dan upgrade aplikasi e-monev	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - Sub Kegiatan Pengendalian dan	✓		Pada tahun 2025 telah dilakukan pemeliharaan dan update data ISB LKPP aplikasi e-monev

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
	dipantau secara Real Time		Evaluasi Program Pembangunan			
9	Terdapat beberapa kali perubahan Perwal tentang APBD sehingga beberapa OPD harus menyesuaikan paket pengadaan pada aplikasi SIRUP LKPP sehingga data paket pengadaan selalu berubah-ubah.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi RUP, realisasi PBJ pada LPSE dan realisasi PDN secara berkala.	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	√		Telah dilaksanakan Monitoring dan evaluasi RUP, realisasi PBJ dan realisasi PDN selama tahun 2025 yaitu pada bulan April, Juli, September dan Desember.
10	Belum optimalnya efektivitas rumusan kebijakan administrasi pembangunan	Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait guna perumusan kebijakan administrasi pembangunan	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	√		Pada tahun 2025 telah dilaksanakan rapat koordinasi mengenai perumusan kebijakan yaitu pada bulan Agustus dan Desember
11	Dokumen revisi hasil rewiu UKPBJ lambat dikembalikan oleh OPD	Kebijakan pembatasan waktu pengembalian Hasil Revisi Dokumen persiapan pemilihan penyedia oleh OPD sesuai dengan SOP Pengadaan Barjas	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	√		Pada bulan Februari tahun 2025 telah dilaksanakan rewiu dokumen pengadaan untuk menjadi bahan evaluasi tribulanan secara keseluruhan.
12	Indikator pembangunan reformasi	Melakukan pendampingan secara intensif	- Program Penunjang	√		Telah dilakukan penguatan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
	birokrasi saat penyusunan dokumen perencanaan masih menggunakan indikator 8 area perubahan sesuai Permenpan 25 Tahun 2020, sedangkan ditengah perjalanan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut terdapat perubahan kebijakan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai Permenpan 3 Tahun 2023. Sesuai peraturan tersebut maka reformasi birokrasi terdapat dua indikator besar yaitu RB general dan RB tematik yang tidak sesuai dengan penentuan indikator RB awal penyusunan dokumen perencanaan	terhadap Perangkat Daerah pengampu dan pendukung RB dengan mengutamakan dampak serta kolaborasi dalam menyusun rencana aksi dan pelaksanaan RB termasuk didalamnya penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik Perlu adanya perubahan atau penyesuaian indikator kinerja untuk sasaran "Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi" mengingat adanya perubahan kebijakan implementasi RB berdasarkan PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah - Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			implementasi RB General dan Tematik tahun 2025 melalui tahapan sosialisasi, pendampingan, monev berkala, serta fasilitasi evaluasi instansi
				√		Fokus Evaluasi RB pada periode transisi tahun 2025, tidak sama dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, capaian indikator diperoleh dari PD yang menjadi koordinator.
13	Rencana tindak lanjut	Melaksanakan pembinaan	- Program	√		Pada tahun 2025 telah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
	perbaikan SKM tahun sebelumnya belum disusun berdasarkan kondisi permasalahan yang ada	elayanan publik setiap 3 (tiga) bulan sekali meliputi monev SOP, SP, maklumat pelayanan dan pelaksanaan aturan ketatalaksanaan seperti Tata Naskah Dinas, Pakaian Dinas, SPBE	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			dilaksanakan pembinaan pelayanan publik rutin setiap 3 bulan.
14	Belum tumbuhnya semangat memunculkan inovasi bagi perangkat daerah	Menerbitkan regulasi 1 perangkat daerah wajib menciptakan 1 atau 2 inovasi setiap tahun			√	Perangkat Daerah pengampu inovasi adalah Bapperinda sehingga fungsi Sekretariat Daerah melalui Bagian Organisasi adalah berkoordinasi dengan Bapperinda
15	Belum adanya komitmen bersama bahwa inovasi adalah sebuah kebutuhan	Melakukan pembinaan rutin setiap tribulan untuk memonev pelaksanaan inovasi masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja			√	Perangkat Daerah pengampu inovasi adalah Bapperinda sehingga fungsi Sekretariat Daerah melalui Bagian Organisasi adalah berkoordinasi dengan Bapperinda
16	Berdasarkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang dimiliki oleh Bagian Umum ada 3 indikator yang	Perbaikan dari unsur sarana prasarana, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana dijadwalkan	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan	√		Pada TB IV telah dilaksanakan perbaikan 3 unsur terendah yakni sarana prasarana,

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
	perlu untuk diperbaiki dalam melaksanakan pelayanan yaitu sarana prasarana, kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana	pada TB IV tahun 2025 dan tahun 2026 oleh Bagian Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana
17	Berdasarkan nilai indeks kepuasan masyarakat dan saran yang diberikan dalam aplikasi Sukma E Jatim beberapa indikator yang perlu ditingkatkan diantaranya yaitu waktu, perilaku pelaksana dan prosedur	Perbaiki dari unsur waktu penyelesaian pelayanan, perilaku pelaksana dan prosedur dijadwalkan pada TB II tahun 2025 oleh Bagian Pemerintahan	- Program: Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat - Kegiatan: Administrasi Tata Pemerintahan - Sub Kegiatan: Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	√		Pada TB II telah dilaksanakan perbaikan 3 unsur terendah yakni waktu penyelesaian pelayanan, perilaku pelaksana dan prosedur
18	Berdasarkan Nilai Indeks Kepuasan yang dimiliki oleh Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat ada 3 indikator yang diharapkan masyarakat ditingkatkan dalam melakukan pelayanan. Indikator tersebut diantaranya yaitu Sarana Prasarana, Waktu dan Produk Spesifikasi	Perbaiki dari unsur sarana prasarana, waktu penyelesaian pelayanan dan produk spesifikasi dijadwalkan pada TB II-IV tahun 2025 oleh Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	√		- Melaksanakan FKP (Forum Konsultasi Publik) membahas 3 nilai terendah SKM dan solusi yang akan dilaksanakan - Melakukan koordinasi bersama guru Ngaji dan Guru Minggu agar tepat waktu dalam pengumpulan berkas sehingga

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
						pencairan dapat dilaksanakan tepat waktu
19	Berdasarkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang dimiliki oleh Bagian Hukum ada 3 indikator yang perlu untuk diperbaiki dalam melaksanakan pelayanan diantaranya yaitu persyaratan, waktu dan prosedur	Perbaiki dari unsur persyaratan, waktu penyelesaian pelayanan dan prosedur dijadwalkan pada TB II tahun 2025 oleh Bagian Hukum	- Program: Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat - Kegiatan: Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	√		- Telah dilaksanakan perbaikan pada TB I dalam pelaksanaan pelayanan yaitu dalam penentuan persyaratan penyusunan produk hukum - Sedangkan waktu pelayanan telah diupayakan untuk ditingkatkan , pada penyusunan produk hukum daerah yang waktu penyelesaiannya dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya kelancaran komunikasi antara perancang peraturan perundang-undangan yang ada di Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah pemrakarsa dan lain-

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
						lain. - Prosedur layanan yang diberikan Bagian Hukum telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20	Berdasarkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang dimiliki oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa ada 3 indikator yang perlu untuk diperbaiki dalam melaksanakan pelayanan yaitu sarana prasarana, prosedur, dan kompetensi pelaksana	Perbaiki dari unsur sarana prasarana, prosedur dan kompetensi pelaksana dijadwalkan pada TB II dan IV tahun 2025 oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	√		Pada TB II telah dilaksanakan perbaikan 3 unsur terendah yakni sarana prasarana, prosedur dan kompetensi pelaksana
21	Berdasarkan nilai indeks kepuasan yang dimiliki oleh Bagian Organisasi ada beberapa indikator yang harus ditingkatkan, yaitu Persyaratan, Waktu dan Prosedur	Perbaiki dari unsur persyaratan, waktu penyelesaian pelayanan dan prosedur dijadwalkan pada TB II tahun 2025 oleh Bagian Organisasi	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja	√		Pada TB II telah dilaksanakan perbaikan unsur persyaratan, waktu penyelesaian pelayanan (menyederhanakan alur birokrasi dan digitalisasi dokumen) dan prosedur (melakukan peninjauan ulang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
			Pemerintah Daerah - Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP))
22	Crosscutting yang dihasilkan belum terintegrasi dengan SOP	Menyusun SOP yang mengintegrasikan crosscutting didalamnya	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√		Pada tahun 2025 telah disusun SOP yang mengintegrasikan aspek cross-cutting.
23	Belum terdapat tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan atas hasil monitoring pencapaian target jangka menengah	Menyusun tindak lanjut rekomendasi monitoring pencapaian target jangka menengah	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√		Pada penyusunan Renja Setda 2025 pada tabel 4.1 telah memuat rencana tindak lanjut atas rekomendasi monitoring pencapaian target periode renstra 2023
24	Hasil revidi	Menyusun	- Program	√		Pada saat

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
	dokumen Renstra belum menunjukkan upaya perbaikan yang memuat inovasi program/ kegiatan yang direncanakan	ranwal renstra yang memuat inovasi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			penyusunan ranwal renstra telah didasarkan pada pohon kinerja yang memuat inovasi program/kegiatan yang direncanakan selama 5 tahun kedepan (2025-2029)
25	Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian (<i>refocusing</i>) organisasi, strategi, dan kebijakan dalam mencapai kinerja	Menyusun rancangan LKj IP 2024 yang menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√		Pada tribulan 1 2025 telah dilakukan perbaikan penyusunan rancangan LKj IP 2024 yang menginfokan kualitas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya
26	Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP belum sepenuhnya menunjukkan peningkatan implementasi SAKIP dan belum dimanfaatkan	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi, pada dokumen	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi	√		- Perubahan target tahun 2025 pada P-Renja Setda 2025 berdasarkan capaian 2024 - Perubahan target pada Perubahan PK 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
	secara optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja, serta perbaikan dan peningkatan kinerja	antara lain: 1. Perubahan Renja Perangkat Daerah 2. Perubahan Perjanjian Kinerja 3. Crosscutting antar Bagian 4. Laporan monev renaksi yang menyajikan penyesuaian strategi dan arah kebijakan dan bukti tindak lanjut atas rekomendasi monev renaksi	Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			berdasarkan dokumen P-Renja Setda 2025 - Laporan monev renaksi yang menyajikan penyesuaian strategi atas dasar permasalahan pencapaian target tahunan atau bulanan

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kota Blitar selaku perangkat daerah yang melaksanakan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk terwujudnya visi misi Kota Blitar 2021-2026, maka berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2025 dimana penganggarannya telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sesuai dengan

ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran yang didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran sesuai dengan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan, serta didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja utama atau pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja utama/sasaran. Dalam laporan ini, Sekretariat Daerah Kota Blitar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja utama/sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Renja Tahun 2025.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja tahun 2025, realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun 2024 dan 2023. Kerangka pengukuran kinerja Instansi Pemerintah tersebut berdasarkan kategori capaian kinerja mengacu skala ordinal dari Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

1. **Rumus 1** : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. **Rumus 2** : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing – masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	85 % s.d 100 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70 % s.d < 85 %	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55 % s.d < 70 %	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2025

Analisis dan evaluasi telah dilakukan guna penyempurnaan/ perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis atas pencapaian kinerja sasaran strategis/kinerja utama pada tahun 2025 merupakan analisis terhadap komitmen Sekretaris Daerah Kota Blitar guna mencapai target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

Kota Blitar. Adapun capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 dapat ditunjukkan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tabel Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja
Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%	116,67%	116,67%
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100%	118,18%	118,18%
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%	100%	100%
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	86,21%	86,21%	100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	100%	100%	100%
		2. Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	39,13%	33,33%	85,18%
		3. Nilai rata - rata SKM Setda	Sangat Baik (89)	Sangat Baik (93,38)	104,92%
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (89)	A (86,37)	97,04%

Sumber : Realisasi Capaian Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025, data diolah

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% capaian
Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%	116,67%	116,67%

Keterangan:

- a. Indikator sasaran yang pertama yakni **Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan** dari target kinerja tahun 2025 sebanyak 6 rumusan kebijakan telah terealisasi 7 kebijakan yang diimplementasikan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Sekretaris Daerah, Surat Edaran dan Perjanjian Kerjasama dibidang fasilitasi keagamaan. Kebijakan tersebut

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

merupakan wujud kepedulian Pemerintah Daerah yang sangat mendukung terwujudnya keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama ditengah-tengah aktifitas keagamaan masyarakat. Adapun kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Walikota Blitar Nomor: 100.3.3.3/329/HK/410.020.3/ 2024 tentang Penetapan Petugas Pembantu Pencatat Nikah di Kelurahan dan Petugas Pembantu Pencatat Perkawinan di Kecamatan Se-Kota Blitar Tahun 2025
2. Surat Walikota Blitar Kepada Gubernur Jawa Timur Nomor: 451/0221/410.020.2/2025 Tanggal 10 Januari 2025 Hal Usulan Petugas Haji Daerah/PHD Kota Blitar Tahun 2025
3. Surat Edaran Walikota Blitar Nomor: 451/0860/410.020.2/2025 tanggal 27 Februari 2025 tentang Kegiatan Masyarakat Selama Bulan Ramadhan Tahun 1446 H/2025 M
4. Keputusan Walikota Blitar Nomor: 100.3.3.3/227/HK/410.020.3/ 2025 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Blitar untuk dioperasikan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar
5. Keputusan Walikota Blitar Nomor: 100.3.3.3/210/HK/410.020.3/ 2025 Tentang Kafilah Kota Blitar pada Musabaqah Tilawatil Qur'an XXXI Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025
6. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dengan Bagian Perekonomian dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Blitar Dengan Panitia Hari Santri Nasional Kota Blitar tentang Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2025 di Kota Blitar Nomor: 57 Tahun 2025 dan Nomor: 018/PAN.HSN-25/SR-02/X/2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

7. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Blitar Nomor: 100.3.3.6/11/Kep/410.020.3/2025 tentang Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hibah Uang pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar

b. Kendala yang dihadapi:

- Belum optimalnya komitmen bersama dan persamaan persepsi antar stakeholder terkait implementasi kebijakan bidang keagamaan

c. Rencana tindak lanjut:

- Melaksanakan pendampingan lebih intensif terhadap fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual
- Menyusun dan memonev rumusan kebijakan bidang bina mental spiritual masyarakat secara berkala
- Mensosialisasikan kebijakan yang mendukung pembinaan mental spiritual masyarakat
- Koordinasi lintas sektor atau antar stakeholder yang intensif guna penguatan komitmen dan penyamaan persepsi terkait implementasi kebijakan bidang keagamaan

Sasaran 2 : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan

Untuk mewujudkan sasaran kedua ini, maka terdapat dua indikator kinerja, yang penjelasan masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator 1:

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% capaian
1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100%	118,18%	118,18%

Keterangan:

Indikator kinerja ini diampu oleh dua bagian yaitu Bagian Pemerintahan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan penjelasan sebagai berikut:

- Berkenaan dengan indikator persentase kebijakan pemerintahan yang diimplementasikan selama tahun 2025, **Bagian Pemerintahan** telah **merealisasikan 2 rumusan kebijakan bidang pemerintahan dari yang ditargetkan sebanyak 1 rumusan kebijakan**. Adapun kebijakan dibidang pemerintahan yang diimplementasikan sebagai berikut:
 1. Surat Edaran Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perwali Nomor 6 Tahun 2022 tentang Program Rukun Tetangga Keren sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Program Rukun Tetangga Keren.
 2. Surat Edaran Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perwali Nomor 6 Tahun 2022 tentang Program Rukun Tetangga Keren Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga Keren
- Sedangkan untuk indikator persentase kebijakan perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan oleh **Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat** telah terealisasi **7 rumusan kebijakan perekonomian dari target 6 rumusan kebijakan dan 4 rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat dari target 4 rumusan kebijakan**

yang diimplementasikan di masyarakat dan pada Perangkat Daerah pengampu.

Adapun kebijakan dibidang perekonomian yaitu:

1. Keputusan Walikota Blitar Nomor: 100.3.3.3/37/HK/410.020.3/2025 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar
2. Keputusan Walikota Blitar Nomor: 100.3.3.3/36/HK/410.020.3/2025 tentang Pengangkatan Kembali Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar
3. Keputusan Walikota Blitar Nomor: 100.3.3.3/45/HK/410.020.3/2025 tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor: 400.13.11/288/410.020.2/2025 tanggal 10 Maret 2025 Hal Optimalisasi Kewirausahaan Pemuda dalam rangka Pemulihan Ekonomi
5. Keputusan Walikota Blitar Nomor: 100.3.3.3/325/HK/410.020.3/2025 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Blitar Periode 2025 – 2027
6. Keputusan Walikota Blitar Nomor: 100.3.3.3/269/HK/410.020.3/2025 tentang Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
7. Keputusan Walikota Blitar Nomor: 100.3.3.3/264/HK/410.020.3/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor: 188/273/HK/410.020.3/2023 tentang Tim Pengendali Inflasi Daerah

Sedangkan untuk kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat yaitu:

1. Keputusan Walikota Blitar Nomor: 188/104/HK/410.020.3/2025 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

2. Keputusan Walikota Nomor: 188/146/HK/410.020.3/2025 tentang Tim Pembina Pesantren Sehat
3. Keputusan Walikota Blitar Nomor: 100.3.3.3/202/HK/410.020.3/2025 tentang Gugus Tugas dan Sekretariat Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Walikota Blitar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat

b.1. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PK 2025:

1. Waktu perubahan pedoman program RT Keren yang terlalu berhimpitan dengan berakhirnya tahun anggaran 2025
2. Implementasi sebagian besar program RT Keren belum sesuai dengan rencana kebijakan Kepala Daerah terpilih
3. Kurang optimalnya identifikasi data sumber air tanah atau air sumur dan jaringan distribusi layanan air bersih atau perpipaan
4. Kurang optimalnya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD serta Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
5. Belum adanya peta kebijakan kesejahteraan rakyat yang bisa mendukung langsung pencapaian tujuan kesejahteraan sosial dan masyarakat
6. Perlunya komitmen bersama dan persamaan persepsi antar stakeholder terkait implementasi rumusan kebijakan bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat

b.2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PK 2024 dan belum selesai ditindaklanjuti pada tahun 2025:

1. Pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) digabung menjadi satu dalam Perwali LKK sehingga pengaturan

masing-masing LKK kurang detail dan masih banyak permasalahan LKK yang belum diatur

c.1. Rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan PK 2025:

1. Mengkoordinasikan perubahan program RT Keren menjadi Karya Mas
2. Menyusun rumusan kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan program prioritas Kepala Daerah terpilih
3. Melaksanakan monitoring pelaksanaan Karya Mas secara rutin dan berjenjang mulai dari lingkup kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota
4. Optimalisasi identifikasi data sumber air tanah atau air sumur dan jaringan distribusi layanan air bersih atau perpipaan
5. Optimalisasi Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD serta Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
6. Lebih intensif melakukan koordinasi kepada instansi vertikal sebagai Pembina Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat serta meningkatkan koordinasi lintas OPD guna memfasilitasi perumusan kebijakan yang menjadi kewenangannya meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB serta Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas.
7. Menyusun dan mensosialisasikan kebijakan yang mendukung kegiatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

c.2. Rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan PK 2024 yang belum selesai ditindaklanjuti pada tahun 2025:

1. Melaksanakan evaluasi pengaturan LKK sebagai bahan reviu apabila tidak sesuai dengan kondisi di lapangan

Indikator 2:

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% capaian
2. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%	100%	100%

Keterangan:

a. Indikator Sasaran Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan capaian kinerjanya mencapai 100%, **dari target 10 rumusan kebijakan terealisasi sebanyak 10 kebijakan yang diimplementasikan**, yaitu antara lain:

1. Penetapan Rencana Umum Pengadaan Melalui Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 oleh Sekretaris Daerah kota Blitar
2. Rekapitulasi Penayangan Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2025
3. Pemberlakuan Pembayaran diluar Sistem pada Pengadaan Barang/Jasa Secara E-Purchasing melalui Katalog V-6
4. Telaah Sekretaris Daerah Kota Blitar atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Blitar
5. Surat Edaran Plh. Sekretaris Daerah Kota Blitar Nomor: 000.3/618/410.030.1/2025 tanggal 11 Juni 2025 tentang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

Penjelasan atas Pelaksanaan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Masa Transisi

6. Surat Edaran Plh. Sekretaris Daerah Kota Blitar Nomor: 000.3/682/410.030.1/2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Perubahan Pengelolaan Domain Aplikasi SPSE
 7. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Blitar Nomor: 000.3/963/410.030.1/2025 tanggal 8 Agustus 2025 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa APBD Tahun Anggaran 2025 Hasil Efisiensi
 8. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Blitar Nomor: 000.3/235/410.030.1/2025 tanggal 22 September 2025 tentang Penyusunan RUP P-APBD Tahun 2025
 9. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Blitar Nomor: 000.3/300/410.030.1/2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Penekanan Penyusunan RUP P-APBD Tahun 2025
 10. Rekapitulasi Penayangan Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Pemerintah Kota Blitar Pagu APBD Perubahan Tahun 2025
- b. Kendala yang dihadapi:
1. Jadwal rencana pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan oleh masing-masing PD belum dapat dilaksanakan secara optimal dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran dengan kegiatan/paket pekerjaan perlu ditingkatkan agar realisasi anggaran terserap lebih optimal
 2. Belum tertibnya perangkat daerah dalam pencatatan realisasi PBJ dan tagging PDN pada LPSE
 3. Dokumen perencanaan yang diajukan oleh Perangkat Daerah pada saat pengajian tender, setelah dilakukan review oleh Pokja yang dibantu tenaga ahli ternyata memerlukan banyak penyesuaian. Hal ini disebabkan penyusunan dokumen

perencanaan kurang teliti dan kurang konsisten dan hasil reviu persiapan PBJ oleh UKPBJ lama dikembalikan oleh OPD

4. Terdapat penyesuaian dengan kebijakan LKPP tentang penonaktifan katalog elektronik versi 5 sehingga perlu adanya adaptasi transaksi belanja PBJ melalui katalog elektronik versi 6
5. Pelaksanaan Diklat Teknis/Fungsional dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional bagi PPBJ, menunggu jadwal dari LKPP

c. Rencana tindak lanjut:

1. Mewajibkan PD untuk mengentry paket pengadaan pada aplikasi SIRUP maksimal pada akhir Februari di tahun selanjutnya dan mendorong PD/Unit Kerja melaksanakan pengadaan sesuai dengan jadwal rencana pengadaan yang dientry pada SIRUP
2. Melaksanakan monev RUP, realisasi PBJ dan kepatuhan terhadap program P3DN secara berkala setiap Triwulan
3. Mengirimkan surat penekanan untuk kepala PD agar segera menginventarisasi paket-paket pengadaan barang/jasa yang melalui UKPBJ dan segera mengajukan paket tersebut ke UKPBJ agar diproses pengadaannya.
4. Monitoring kepada PD terkait pelaksanaan belanja PBJ pada katalog elektronik serta memfasilitasi penyedia yang ingin menayangkan produknya pada katalog elektronik.
5. Membuka klinik konsultasi di Bagian Layanan Pengadaan setiap hari pada jam kerja untuk mendampingi penyedia mulai dari konsultasi persyaratan pendaftar di LPSE, verifikasi akun LPSE sampai mendampingi proses input produk pada Katalog Elektronik.
6. Mengikutsertakan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, personil UKPJB dan PPKom dalam Diklat Teknis/Fungsional dan Uji Kompetensi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LKPP.

Sasaran 3: Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% capaian
Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	86,21%	86,21%	100%

Keterangan:

- a. Berkenaan dengan indikator sasaran Persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi memperoleh capaian kinerja sebesar 100% dan masuk kategori sangat berhasil. Hal ini dibuktikan dari 26 OPD yang menjadi koordinator (pengampu) dan pendukung RB General dan RB Tematik Tahun 2025 di Kota Blitar semuanya telah menerapkan dan memonev 4 area perubahan Reformasi Birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik) melalui aksi-aksi pencapaian target kegiatan utama dan indikator sasaran tematik sehingga mencapai realisasi sebesar 86,21%. Hal ini tidak terlepas dari pembinaan yang kontinu terhadap penerapan reformasi birokrasi pada seluruh Perangkat Daerah baik melalui sosialisasi, internalisasi, pendampingan, desk, coaching dan sharing bersama terkait pemecahan masalah penerapan dan monev pelaksanaan reformasi birokrasi.

Indikator ini sudah tidak relevan dengan kebijakan evaluasi reformasi birokrasi sesuai PermenPAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 yangmana fokus pada pencapaian RB General dan RB tematik, sehingga kedepan akan dilakukan penyesuaian sasaran dan indikator terkait implementasi RB di Kota Blitar.

b. Kendala yang dihadapi:

1. Dinamika peraturan penerapan reformasi birokrasi (transisi implementasi RB menuju grand design RB Nasional 2025-2045)
2. Perlunya re-komitmen implementasi SAKIP mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal pada seluruh jenjang jabatan
3. Dinamika peraturan kelembagaan yang belum pasti
4. Beberapa OPD belum tepat waktu dalam pelaporan tindak lanjut SKM tahun 2024
5. Beberapa OPD belum maksimal memanfaatkan aplikasi Sukma e-Jatim
6. Masih ada beberapa OPD yang belum melaksanakan FKP

c. Rencana Tindak Lanjut:

1. Menyusun renaksi RB tahun 2026 dan monev renaksi RB tahun 2025 berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 sambil menunggu ditetapkannya grand design RB Nasional 2025-2045
2. Pemanfaatan aplikasi SAKIP secara berkesinambungan dan menjadi budaya ASN
3. Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait perkembangan kebijakan
4. Diadakan monev pelaporan tindak lanjut SKM per tribulan
5. Diadakan monev pemanfaatan Sukma e-Jatim dan pelaporan SKM per tribulan
6. Sosialisasi kewajiban pelaksanaan FKP

Sasaran 4: Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik

Seperti halnya sasaran 2, maka sasaran 4 ini terdapat 3 (tiga) indikator yaitu:

Indikator 1:

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% capaian
1. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	100%	100%	100%

Keterangan:

- a. Indikator sasaran Persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM ditargetkan sebesar 100% atau seluruh Perangkat Daerah yang ada dan terealisasi semua sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa semua Perangkat Daerah di Kota Blitar telah menindaklanjuti hasil SKM 2024 dalam bentuk aksi-aksi perbaikan yang telah dilaksanakan pada periode tahun anggaran 2025. Aksi tersebut merupakan upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan 3 (tiga) komponen terendah dari hasil SKM Perangkat Daerah mengacu pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017.
- Berdasarkan **realisasi tahun 2025 sebesar 100% yang mana telah mencapai target akhir Renstra Sekretariat Daerah 2021 – 2026 sebesar 100% atau sebanyak 30 Perangkat Daerah.**

b. Kendala yang dihadapi:

1. Rendahnya validitas data yang disebabkan oleh pengisian instrument sukma e-Jatim yang kurang akuntabel oleh responden, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan persepsi publik yang objektif
2. Beberapa OPD belum tepat waktu dalam pelaporan tindak lanjut SKM tahun 2024

c. Rencana Tindak Lanjut:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

Pada tahun 2026 perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh OPD untuk menindaklanjuti hasil SKM sesuai *time line*.

Indikator 2

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% capaian
2. Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	39,13%	33,33%	85,18%

Keterangan:

- a. Indikator yang kedua dari sasaran ke-5 yaitu Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik. Indikator ini dihitung dengan cara membandingkan inovasi tahun n dengan inovasi tahun n-1. Dimana jumlah inovasi pelayanan publik yang baru tahun 2025 meningkat sebanyak 3 inovasi dari inovasi tahun sebelumnya sejumlah 9 inovasi sehingga terjadi peningkatan sebesar 33,33%.

INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOTA BLITAR TAHUN 2024

NO	BENTUK DAN JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	TAHUN
1	PENA PINK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2024
2	SEMAR BERLAGA (Selesaikan Masalah Bersama Mako 83)	Satuan Polisi Pamong Praja	2024
3	Layanan Perizinan Kunjung UMKM Daftarkan Usaha (LAPAN KUDA)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2024
4	ASIK BRO (Atasi Stunting Kolaborasi Bersama OPD)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2024
5	AJI BAWA KOPER (Ayo Mengaji Bareng Siswa Sekolah Perempuan)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2024
6	NIKI MASE (Pengelola Pojok Klinik Industri dan Rumah Kemasan IKM/UKM)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

7	SERUNI (Stimulan Rumah Layak Huni)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2024
8	POSYANKUM (Pos Pelayanan Hukum)	Kelurahan Karangsari	2024
9	i-Sentul	Kelurahan Sentul	2024

Sumber: Bagian Organisasi dan Bapperinda Kota Blitar, 2024

INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOTA BLITAR TAHUN PENERAPAN 2025

NO	BENTUK DAN JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	TAHUN
1	INOLAPS (Inovasi Layanan Premenstrual Syndrome)	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3	2025
2	Pemberdayaan Peserta Didik Dalam Membangun Kesadaran Lingkungan Yang Berkelanjutan Melalui Pembuatan Kertas Daur Ulang	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5	2025
3	Pemanfaatan Bunga Telang untuk Motif Batik "Sekar Telang" khas SMPN 9 Blitar	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9	2025

Sumber: Bagian Organisasi dan Bapperinda Kota Blitar, 2025

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat/pengguna layanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

b. Kendala yang dihadapi:

1. Belum tumbuhnya semangat untuk memunculkan inovasi bagi perangkat daerah
2. Belum adanya komitmen bersama bahwa inovasi adalah sebuah kebutuhan

c. Rencana tindak lanjut:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

1. Mengkoordinasikan ke Bapperinda selaku Pembina inovasi agar menyusun regulasi yang mewajibkan bagi Perangkat Daerah untuk menciptakan 1 atau 2 inovasi setiap tahun
2. Mengkoordinasikan ke Bapperinda untuk melakukan pembinaan rutin bersama Bagian Organisasi setiap tribulan untuk memonev pelaksanaan inovasi masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Indikator 3

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% capaian
3. Nilai rata - rata SKM Setda	Sangat Baik (89,00)	Sangat Baik (93,38)	104,92%

Keterangan:

Dari hasil SKM melalui sukma-e jatim pada pelayanan di lingkungan Setda Kota Blitar atas 9 unsur yaitu persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, tarif/biaya, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan serta sarana dan prasarana yang dilakukan pada Tahun 2025 dihasilkan nilai 93,38 atau masuk kategori Sangat Baik dan perlu untuk dipertahankan pada periode berikutnya, terutama pada unsur penanganan pengaduan, biaya/tarif serta perilaku pelaksana. Sedangkan unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan yakni waktu penyelesaian pelayanan, sarana prasarana dan produk spesifikasi melalui pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Indikator prioritas	Nilai	Analisis	Rekomendasi/ Harapan Pengguna Layanan	Waktu Pelaksanaan
1	Waktu	87,97	Nilai terendah menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh pada tata kelola waktu pelayanan. Perangkat Daerah berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi pada aspek peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil	a. Evaluasi dan penyederhanaan SOP pelayanan untuk menghilangkan tahapan yang tidak efektif	1-2 bulan
				b. Penetapan dan publikasi standar waktu pelayanan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat	1 bulan
				c. Penataan ulang pembagian tugas dan jam pelayanan petugas, khususnya pada jam sibuk	2-3 bulan
				d. Pengembangan dan optimalisasi sistem antrian atau layanan berbasis digital guna mempercepat proses pelayanan	6-12 bulan
2	Produk Spesifikasi	89,06	Nilai ini menunjukkan bahwa kesesuaian antara produk yang diterima masyarakat dengan standar	a. Peninjauan dan pemutakhiran spesifikasi produk agar sesuai dengan ketentuan, standar mutu, dan kebutuhan masyarakat.	2 bulan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Indikator prioritas	Nilai	Analisis	Rekomendasi/ Harapan Pengguna Layanan	Waktu Pelaksanaan
			spesifikasi yang ditetapkan OPD masih perlu diperkuat. OPD berkomitmen melakukan pembenahan pada aspek penetapan, kejelasan, dan konsistensi produk spesifikasi sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi pada aspek peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil	b. Penyusunan dokumen standar spesifikasi produk yang jelas, terukur, dan mudah dipahami oleh masyarakat	2 - 3 bulan
				c. Penguatan pemahaman petugas terhadap spesifikasi produk agar produk yang dihasilkan konsisten dengan standar yang ditetapkan	1 - 2 bulan
				d. Monitoring dan evaluasi kesesuaian produk secara berkala untuk menjamin mutu dan kepastian hasil yang diterima masyarakat	3 - 6 bulan
3	Sarana Prasarana	89,15	Sarana prasarana pelayanan dinilai cukup memadai, namun memerlukan peningkatan secara bertahap dan berkelanjutan. OPD berkomitmen melakukan pembenahan fasilitas pelayanan sebagai bagian dari Reformasi	a. Inventarisasi dan pemetaan kondisi sarana prasarana sebagai dasar perencanaan perbaikan dan penganggaran	1-2 bulan
				b. Pemeliharaan rutin serta penataan ulang ruang pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi	3-6 bulan
				c. Pengadaan dan penambahan sarana	6-12 bulan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Indikator prioritas	Nilai	Analisis	Rekomendasi/ Harapan Pengguna Layanan	Waktu Pelaksanaan
			Birokrasi pada aspek pelayanan publik serta mendukung Asta Cita peningkatan kualitas hidup dan kenyamanan masyarakat	pendukung pelayanan, termasuk fasilitas aksesibilitas bagi kelompok rentan	
				d. Peningkatan kebersihan, keamanan, dan estetika ruang layanan sebagai bagian dari budaya pelayanan prima	Berkelanjutan

Sasaran 5: Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	%capaian
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (89,00)	A (86,37)	97,04%

Keterangan:

a. Indikator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2025 yang ditargetkan memperoleh nilai 89 terealisasi dibawah target yakni 86,37 atau dengan capaian 97,04%. Realisasi ini dapat diartikan belum berhasil dalam memenuhi target sehingga kedepan perlu adanya prioritas penyelesaiannya dari permasalahan-permasalahan dalam implementasi SAKIP Perangkat Daerah terutama menindaklanjuti LHE SAKIP dari Inspektorat Daerah.

b. Kendala yang dihadapi:

1. Belum menyajikan permasalahan/kendala dan rekomendasi/tindak lanjut dalam pengukuran kinerja
2. Dokumen pendukung penyajian informasi dalam laporan kinerja agar mencakup seluruh pegawai menengah

c. Rencana Tindak Lanjut:

1. Pengukuran kinerja TB 3 tahun 2025 dan seterusnya akan menyajikan permasalahan/kendala dan rekomendasi/tindak lanjut
2. Melengkapi dokumen pendukung penyajian informasi dalam laporan kinerja yang mencakup seluruh pegawai

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 – 2025

Realisasi kinerja pada tahun 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2024, maka diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2023 sampai Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN KINERJA		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	116,67%	100%	100%	116,67 %
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	125%	118,18 %	100%	125%	118,18 %
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN KINERJA		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	65,52%	80,00%	86,21 %	80,00%	80,00%	86,21%	138,97 %	100%	100%
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	27,59%	100%	100%	100%	100%	100%	362,45 %	100%	100%
		Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	NA	25%	39,13 %	NA	39,13%	33,33%	NA	156,52 %	85,18 %

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN KINERJA		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
		Nilai rata - rata SKM Setda	Baik (87)	Sangat Baik (88,32)	Sangat Baik (89,00)	Baik (86,02)	Sangat Baik (88,77)	Sangat Baik (93,38)	98,87%	100,51 %	104,92 %
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	A (85,55)	A (86,32)	A (86,37)	98,33%	98,09%	97,04 %

Dari perbandingan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Secara umum hampir keseluruhan pencapaian indikator kinerja urusan Sekretariat Daerah dari tahun 2023 sampai tahun 2025 selalu memenuhi target. Hal ini menunjukkan keberhasilan kinerja organisasi dalam mendukung pencapaian target akhir Renstra 2021-2026 terutama pada Misi ke-1 **“Meningkatkan tata kehidupan yang religius, nasionalis, setara gender dan berkepribadian dalam kebudayaan”** serta Misi ke-5 **“Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi”**
- b. Indikator yang capaiannya 100% dari tahun 2023 sampai tahun 2025
 - 1) Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan
Hal ini disebabkan rumusan kebijakan administrasi pembangunan dan umum yang diimplementasikan dari tahun 2023 sampai 2025 selalu terealisasi sesuai target, karena bersifat rutin dan bersifat amanat dari instansi Pembina
- c. Indikator yang capaiannya melebihi tahun sebelumnya
 - 1) Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan
Capaian kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 16,67% dari tahun 2024. Hal ini disebabkan rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditargetkan sebanyak 6 rumusan kebijakan telah terealisasi 7 kebijakan yang diimplementasikan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Sekretaris Daerah, Surat Edaran dan Perjanjian Kerjasama dibidang fasilitasi keagamaan. Kebijakan tersebut merupakan wujud kepedulian Pemerintah Daerah guna

menciptakan keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama ditengah-tengah aktifitas keagamaan masyarakat.

- 2) Nilai rata-rata SKM Sekretariat Daerah dengan capaian di tahun 2023 sebesar 98,87%, tahun 2024 sebesar 100,51%, dan capaian tahun 2025 sebesar 104,92%.

Pada tahun 2023 tidak memenuhi target disebabkan adanya perubahan dasar perhitungan jenis layanan yang ada di Sekretariat Daerah, dimana perhitungan SKM diambil dari semua layanan yang ada pada 6 (enam) Bagian di lingkup Sekretariat Daerah. Pada tahun 2023 masing-masing bagian belum merata mengambil data hasil SKM, sedangkan pada tahun 2024 dan 2025 hampir semua bagian sudah meningkatkan kualitas layanannya sesuai dengan standar pelayanan sehingga berhasil melampaui target yang sudah ditetapkan.

- d. Indikator yang capaiannya memenuhi target namun persentase capaian lebih rendah dari tahun sebelumnya

- 1) Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan

Capaian Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan pada tahun 2023 sebesar 100% naik menjadi 125% pada tahun 2024 dan tahun 2025 menjadi 118,18%. Hal ini disebabkan rumusan kebijakan bidang pemerintahan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang semula ditargetkan 12 rumusan kebijakan terealisasi sebanyak 15 rumusan kebijakan, mengalami penurunan di tahun 2025 dari target 11 rumusan kebijakan terealisasi 13 rumusan kebijakan menyesuaikan dinamika peraturan perundang-undangan diatasnya serta kebutuhan prioritas daerah.

- 2) Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi dari capaian tahun 2023

sebesar 122,10% menjadi 100% di tahun 2024 dan tahun 2025, hal ini disebabkan adanya penyesuaian target perencanaan tahun 2024 dan penyesuaian implementasi evaluasi reformasi birokrasi berdasarkan Permenpan RB nomor 9 Tahun 2023 dengan lebih fokus pada penghitungan capaian indikator kinerja RB General dan RB Tematik

- 3) Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM, dimana capaian tahun 2023 sebesar 362,45%, tahun 2024 sebesar 100%, dan tahun 2025 sebesar 100%. Realisasi indikator tahun 2023 jauh melampaui target akhir renstra 2021-2026 disebabkan penentuan target yang belum sepenuhnya menggambarkan kriteria *SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound)* sehingga dilakukan perbaikan target pada tahun 2024 – 2026 sebesar 100% dan diharapkan terealisasi sesuai dengan target
- e. Indikator yang capaiannya belum memenuhi target dan persentase capaian lebih rendah dari tahun 2023 dan 2024
- Nilai SAKIP Perangkat Daerah dimana pada tahun 2023 terealisasi 85,55 tahun 2024 sebesar 86,32 dan tahun 2025 sebesar 86,37. Dari hasil tersebut dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, namun masih belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena hasil pengukuran kinerja organisasi belum mampu mempengaruhi penyesuaian kebijakan dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja, belum semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan, serta hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang optimal dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.
- Oleh karena itu untuk mencapai target yang telah ditentukan perlu adanya optimalisasi implementasi SAKIP di lingkup

Sekretariat Daerah melalui upaya pelaksanaan monev pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh pegawai pada Sekretariat Daerah atas capaian target yang ditetapkan serta memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi, melalui penyesuaian-penyesuaian dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja yang mengedepankan perubahan strategi dan arah kebijakan dari hasil rekomendasi yang ada.

- f. Indikator yang capaiannya dibawah target tahun 2025 dan dibawah capaian 2024 namun tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2023 karena merupakan indikator baru hasil pemetaan pohon kinerja Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik, dari target 25% capaian 2024 telah melampaui target sebesar 39,13% dan kembali turun di tahun 2025 sebesar 33,33% dibawah target yang ditetapkan sebesar 39,13%. Dan secara jumlah totalpun masih terlalu kecil dari yang diharapkan yakni meningkat dari 6 inovasi di tahun 2024 menjadi 9 inovasi di tahun 2025, hal ini menunjukkan perlu adanya penguatan komitmen dan regulasi yang mengatur serta pembinaan yang intensif tentang pentingnya inovasi pelayanan publik.
- g. Capaian kinerja atas sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2025 dapat dikatakan Sangat Berhasil, walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak mengalami kendala. Beberapa kendala dimaksud dapat dijadikan bahan guna pencapaian kinerja yang lebih baik lagi.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 sampai dengan akhir
Periode Renstra 2021 – 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan terhadap Renstra
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%	116,67%	116,67%
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100%	118,18%	118,18%
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%	100%	100,00%
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	100%	86,21%	86,21%
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut	100%	100%	100,00%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan terhadap Renstra
		atas hasil SKM			
		2. Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	25%	33,33%	133,32%
		3. Nilai rata - rata SKM Setda	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (93,38)	103,76%
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (90)	A (86,37)	95,97%

Berdasarkan tingkat kemajuan pencapaian sasaran target akhir renstra 2021 - 2026 maka ada 6 (enam) indikator sasaran yang sudah mencapai target akhir renstra yakni:

- ✓ Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan
- ✓ Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan
- ✓ Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan
- ✓ Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM
- ✓ Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik
- ✓ Nilai rata-rata SKM Setda

Sehingga capaian ini akan dipertahankan dan ditingkatkan pada realisasi periode renstra 2025-2029, termasuk untuk 2 (dua) indikator yang belum mencapai target akhir renstra.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional atau Provinsi atau Kabupaten/Kota

Apabila disusun perbandingannya antara realisasi kinerja Sekretariat Daerah dengan realisasi nasional, maka tidak terdapat tabel yang dapat disajikan, dikarenakan realisasi kinerja pada Sekretariat Daerah tidak diukur secara nasional, namun ada yang bisa diperbandingkan dengan realisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Setda Kota Blitar dengan Realisasi Kinerja Setda Kabupaten Trenggalek Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Setda Kota Blitar	Realisasi Setda Kabupaten Trenggalek	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	116,67%	-	Tidak bisa disandingkan karena indikator ini pada Setda Kabupaten Trenggalek digabung dengan kebijakan kesejahteraan rakyat
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	118,18%	-	Tidak bisa disandingkan karena pada Setda Kabupaten Trenggalek kebijakan perekonomian dijadikan satu dengan kebijakan pembangunan
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang	100%	-	Tidak bisa disandingkan karena pada Setda Kabupaten Trenggalek

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Setda Kota Blitar	Realisasi Setda Kabupaten Trenggalek	Keterangan
		diimplementasikan			kebijakan perekonomian dijadikan satu dengan kebijakan pembangunan
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	86,21%	-	Tidak bisa disandingkan karena tidak diukur oleh Setda Kabupaten Trenggalek
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	100%	-	Tidak bisa disandingkan karena tidak diukur oleh Setda Kabupaten Trenggalek
		Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	33,33%		Tidak bisa disandingkan karena tidak diukur oleh Setda Kabupaten Trenggalek

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Setda Kota Blitar	Realisasi Setda Kabupaten Trenggalek	Keterangan
		Nilai rata - rata SKM Setda	Sangat Baik (93,38)	99,61	- Realisasi Setda Kota Blitar sebesar 93,38 dari target 89,00 - Realisasi Setda Kabupaten Trenggalek sebesar 99,61 dari target 91
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (86,37)	AA (91,49)	- Realisasi Setda Kota Blitar sebesar 86,37 dari target 89,00 - Realisasi Setda Kabupaten Trenggalek sebesar 91,49 dari target 91,30

Sumber: Bagian Organisasi Kota Blitar, 2025

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)

Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Blitar maka perlu didukung anggaran program tahun 2025 sebagai berikut:

1. Belanja Operasional : Rp. 43.569.222.806,00
2. Belanja Modal : Rp. 1.330.973.736,00 +

Jumlah : Rp. 44.900.196.542,00

yang dijabarkan dalam realisasi anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 pada Sekretariat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
BAGIAN PEMERINTAHAN				
I	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.845.936.890,00	1.731.796.445,00	93,81
1	Administrasi Tata Pemerintahan	1.697.368.690,00	1.591.722.445,00	93,77
1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	315.512.500,00	305.340.244,00	96,77
1.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	933.453.490,00	863.901.375,00	92,54
1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	448.402.700,00	422.480.826,00	94,21
2	Fasilitasi Kerjasama Daerah	148.568.200,00	140.074.000,00	94,28
2.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	148.568.200,00	140.074.000,00	94,28
II	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	22.000.000,00	21.450.000,00	97,5
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	22.000.000,00	21.450.000,00	97,5
1.1	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	22.000.000,00	21.450.000,00	97,51
BAGIAN HUKUM				
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	709.040.840,00	672.385.233,00	94,83
1	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	709.040.840,00	672.385.233,00	94,83
1.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	180.655.840,00	178.129.345,00	98,60
1.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	322.375.900,00	290.623.982,00	90,15
1.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	206.009.100,00	203.631.906,00	98,84
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
I	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9.869.187.535,00	9.447.989.870,00	95,73
1	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	9.869.187.535,00	9.447.989.870,00	95,73
1.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8.959.037.836,00	8.708.678.844,00	97,20
1.2	Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	52.496.100,00	45.969.500,00	87,56

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.3	Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	240.003.969,00	151.152.012,00	62,97
II	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	617.649.630,00	542.189.514,00	87,78
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	417.649.204,00	365.625.455,00	87,54
1.1	Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	283.295.974,00	249.255.823,00	87,98
1.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	89.427.230,00	79.344.210,00	88,72
1.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	44.926.000,00	37.025.422,00	82,41
2	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	200.000.426,00	176.564.056,00	88,28
2.1	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	200.000.426,00	176.564.056,00	88,28
	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA			
I	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	505.987.689,00	476.923.063,00	90,67
1	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	110.356.400,00	108.634.121,00	98,43
1.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	19.668.000,00	18.616.121,00	94,65
1.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	90.688.400,00	90.018.000,00	99,26
2	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	395.631.289,00	368.288.942,00	93,08
2.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	211.697.175,00	209.074.962,00	98,76
2.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara elektronik	89.307.614,00	88.330.500,00	98,90
2.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	94.626.500,00	71.141.480,00	75,18
	BAGIAN ORGANISASI			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	684.497.015,00	645.591.052,00	94,32
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.354.000,00	13.105.008,00	98,14
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.854.000,00	7.630.008,00	97,15
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.500.000,00	5.475.000,00	99,55

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
2	Penataan Organisasi	574.343.015,00	536.854.044,00	93,47
2.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	159.557.900,00	158.910.734,00	99,59
2.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	230.039.812,00	193.735.613,00	84,22
2.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	171.577.003,00	171.082.697,00	99,71
2.4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5.000.000,00	5.000.000,00	100
3.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	8.168.300,00	8.125.000,00	99,47
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96.800.000,00	95.632.000,00	98,79
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	26.250.000,00	25.970.000,00	98,93
3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70.550.000,00	69.662.000,00	98,74
BAGIAN UMUM				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.263.546.573,00	29.461.780.775,00	94,23
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.626.275,00	65.626.100,00	99,99
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	65.626.275,00	65.626.100,00	99,99
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.572.133.230,01	13.310.100.822,00	91,33
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.570.483.230,01	13.308.450.822,00	91,33
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	,00	,00	,00
4.1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	,00	,00	,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.659.520.121,00	1.610.946.375,00	97,07
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.885.391,00	75.569.330,00	99,58
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.394.200,00	98.511.700,00	99,11
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.185.900,00	23.166.875,00	99,91
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	992.958.430,00	946.444.998,00	95,31
5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.893.800,00	26.531.300,00	98,65
5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	66.675.000,00	66.330.000,00	99,48
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	374.527.400,00	374.392.172,00	99,96
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	808.029.273,00	795.932.478,00	98,50
6.1	Pengadaan Mebel	-	-	
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	808.029.273,00	795.932.487,00	98,50
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.919.505.075,00	4.692.602.504,00	95,38
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	441.000,00	440.000,00	99,77
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.161.198.462,00	1.032.964.435,00	88,95
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	205.272.553,00	199.054.500,00	96,97
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.552.593.060,00	3.460.143.569,00	97,39
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.323.978.815,00	2.199.953.040,00	94,66
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata	388.888.508,00	360.527.000,00	92,70
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	543.676.808,00	492.822.750,00	90,64
8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	220.101.500,00	217.013.486,00	98,59
8.4	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	-	
8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.171.311.999,99	1.129.589.804,00	96,43

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
8.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	
9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	984.437.581,00	948.559.448,00	96,35
9.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	239.715.981,00	205.362.594,00	85,66
9.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	138.721.600,00	137.465.950,00	99,09
9.3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6.000.000,00	5.730.904,00	95,51
9.4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
10	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4.357.319.997,00	4.277.845.209,00	98,17
10.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.547.181.201,00	2.505.758.324,00	98,37
10.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.508.447.596,00	1.472.801.443,00	97,63
10.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	301.691.200,00	299.285.442,00	99,20
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.568.596.205,00	1.556.814.799,00	99,24
11.1	Fasilitasi Keprotokolan	1.456.505.005,00	1.453.949.599,00	99,82
11.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	11.700.000,00	1.500.000,00	12,82
11.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100.391.200,00	100.365.200,00	99,97
	JUMLAH ANGGARAN SETDA	44.900.196.542,00	42.457.916.438,00	94,56

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 42.457.916.438,00 atau sebesar 94,56%. Capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025 termasuk kategori **Sangat Berhasil**.

a. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Dari gambaran realisasi secara keseluruhan diatas, maka perlu untuk dijelaskan pula alokasi anggaran per sasaran strategis Sekretariat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Tabel Alokasi Anggaran per Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2025

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	%
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	8.959.037.836,00	19,95
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	3.487.127.429,00	7,77
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	505.987.689,00	1,13
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	339.303.203,00	0,75
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	235.039.812,00	0,52
		Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik		
		Nilai rata - rata SKM Setda	15.031.893.221,99	33,48
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	16.341.807.351,01	36,40
TOTAL ANGGARAN			44.900.196.542,00	100,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

b. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 dapat disajikan pada tabel pencapaian kinerja dan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.7
Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%	116,67%	116,67%	8.959.037.836,00	8.708.678.844,00	97,21%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAA N RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	100%	116,67%	116,67%	8.959.037.836,00	8.708.678.844,00	97,21%
	Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 1				116,67%	8.959.037.836,00	8.708.678.844,00	97,21%
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	1) Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100%	118,18%	118,18%	3.487.128.429,00	3.164.922.704,00	90,76%
	PROGRAM	Persentase rumusan	100%	200%	200%	1.845.936.890,00	1.731.796.445,00	93,82%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	kebijakan pemerintahan yang ditindaklanjuti						
		Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	100%	100%	100%			
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	85,71%	100%	116,67%	22.000.000,00	21.450.000,00	97,5%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	100%	100%	100%	709.040.840,00	672.365.233,00	94,83%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	292.500.069,00	197.121.512,00	67,39%
	PROGRAM	Persentase rumusan	100%	116,67%	116,67%	617.649.630,00	542.189.514,00	87,78%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti						
		2) Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%	100%	100%	505.987.689,00	476.923.063,00	94,26%
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1) Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100,00%	505.987.689,00	476.923.063,00	94,26%
		2) Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement	76,67%	76,67%	100%			
	Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 2				109,09%	3.993.115.118,00	3.641.865.767,00	91,20%
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana,	86,21%	86,21%	100,00%	339.303.203,00	338.118.431,00	99,65%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
		penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase PD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	86,21%	86,21%	100%	339.303.203,00	338.118.431,00	96,65%
	Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 3				100%	339.303.203,00	338.118.431,00	96,65%
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1) Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	100%	100%	100%	253.039.812,00	198.735.613,00	84,55%
		2) Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	39,13%	33,33%	85,18%			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/	Persentase PD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	41,38%	72,73%	175,76%	253.039.812,00	198.735.613,00	84,55%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
	KOTA							
		3) Nilai rata - rata SKM Setda	Sangat Baik (89,00)	Sangat Baik (93,38)	104,92%	15.031.893.221,99	14.540.733.578,00	96,73%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Fasilitas Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	15.031.893.221,99	14.540.733.578,00	96,73%
	Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 4				96,70%	15.266.933.033,99	14.739.469.191,00	96,55%
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (89,00)	A (86,37)	97,04%	16.341.807.351,01	15.029.784.205,00	91,97%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik (89,00)	Sangat Baik (93,38)	104,92%	16.341.807.351,01	15.029.784.205,00	91,97%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
		Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 5			97,04%	16.341.807.351,01	15.029.784.205,00	91,97%

c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat Efisiensi pemanfaatan anggaran terhadap pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Tabel Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4/5
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	116,67%	97,21%	1,20
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	116,67%	97,21%	1,20
	Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 1		116,67%	97,21%	1,20
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	1) Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	118,18%	90,76%	1,30
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	200%	93,82%	1,60
		Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	100%		
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	116,67%	97,50%	1,20

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4/5
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	100%	94,83%	1,05
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	67,39%	1,48
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	87,78%	1,14
		2) Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%	94,26%	1,06
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100,00%	94,25%	1,06
		2. Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement	100,00%		
	Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 2		109,09%	91,20%	1,20

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4/5
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	100%	99,65%	1,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	100%	99,65%	1,00
	Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 3		100%	99,65%	1,00
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	100%	84,55%	1,38
		Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	85,18%		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	175,76%	84,55%	2,08
		Nilai rata - rata SKM Setda	104,92%	96,73%	1,08
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ ketentuan yang berlaku	100%	96,73%	1,033

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4/5
	Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 4		96,70%	96,55%	1,00
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	97,04%	91,97%	1,06
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	104,92%	91,97%	1,14
	Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 5		97,04%	91,97%	1,06

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya:

- 1) Sasaran Strategis 1: pada tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan”** dengan indikator: Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Keagamaan yang diimplementasikan dengan target 100% terealisasi 116,67%, menghasilkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,20 dan dikatakan **efisien**. Hal ini karena untuk mencapai kinerja sebesar **116,67%** diperlukan capaian anggaran sebesar 97,20% dengan didukung kepedulian Pemerintah Daerah yang sangat besar terhadap terwujudnya keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama ditengah-tengah aktifitas keagamaan masyarakat
- 2) Sasaran Strategis 2: pada tabel diatas untuk sasaran **“Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan”** dengan indikator (1) Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan

Rakyat yang diimplementasikan dengan target 100% terealisasi 118,18% dan (2) Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan dengan target 100% terealisasi 100%, menghasilkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,20 **atau efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar **109,09%** hanya diperlukan capaian anggaran sebesar 91,20%. **Hal ini didukung pula adanya faktor pendorong antara lain:**

1. Rumusan Kebijakan Pemerintahan

(1) adanya keterlibatan kampus/perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi tepat guna di kota blitar (2) koordinasi yang intensif dengan stake holder dan PD terkait urusan kewilayahan (3) kerjasama dan koordinasi yang sinergi dengan PD selaku penyedia dan penyusun data capaian kinerja (4) kepedulian perangkat kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya pada administrasi pemberdayaan masyarakat (5) Aplikasi E-LPPD Kota Blitar yang membantu penginputan data capaian kinerja PD

2. Rumusan Kebijakan Perekonomian

(1) Langkah-langkah revitalisasi struktur dan kultural manajemen BUMD (Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar) (2) Potensi UKM, IKM dan Ekraf Kota Blitar cukup menjadi modal dan didukung dengan agenda Kota Blitar tahunan (event) yang semakin digiatkan oleh Perangkat Daerah pelaksana

3. Rumusan Kebijakan Administasi Pembangunan

(1) Tata kelola penyusunan kebijakan dan pengadaan barang/jasa yang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (2) Koordinasi antar lembaga baik vertikal maupun antar OPD intensif dilaksanakan (3) Monev pembangunan yang rutin dilaksanakan per tribulannya

- 3) "Sasaran Strategis 3: pada tabel diatas untuk sasaran **"Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi"** dengan indikator: Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik) dengan target 86,21% terealisasi 86,21%, menghasilkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,00 dan dikatakan **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar **100%** diperlukan capaian anggaran sebesar 99,65%, dan didukung oleh adanya:
- (1) Pembinaan yang kontinu terhadap penerapan reformasi birokrasi pada seluruh Perangkat Daerah baik melalui sosialisasi, internalisasi, pendampingan, desk, coaching dan sharing bersama terkait pemecahan masalah penerapan dan monev pelaksanaan reformasi birokrasi (2) Integrasi aplikasi manajemen kinerja
- 4) Sasaran Strategis 4: pada tabel diatas untuk sasaran **"Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik"** dengan indikator (1) Persentase PD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM dengan target 100% terealisasi 100%, (2) Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik dengan target 39,13% terealisasi 33,33% (3) Nilai rata-rata SKM Setda dengan target 89,00 terealisasi 93,38 sehingga menghasilkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,00 atau dikatakan **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar **96,70%** diperlukan capaian anggaran sebesar 96,55%. Hal ini didukung oleh komitmen Pimpinan Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, menyusun laporan SKM PD berpedoman pada

PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 serta menindaklanjuti rekomendasi dari hasil SKM PD tepat waktu.

- 5) Sasaran Strategis 5: pada tabel diatas untuk sasaran **“Meningkatnya kinerja perangkat daerah”** dengan indikator: Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 89,00 terealisasi 86,37 sehingga menghasilkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,06 dan dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar **97,04%** membutuhkan capaian anggaran sebesar 91,97%. Hal ini diartikan belum berhasil dalam memenuhi target sehingga kedepan perlu adanya prioritas penyelesaian dari permasalahan-permasalahan dalam implementasi SAKIP Perangkat Daerah terutama menindaklanjuti LHE SAKIP dari Inspektorat Daerah, serta lebih menguatkan komitmen masing-masing pimpinan unit kerja di lingkup Sekretariat Daerah dalam memahami konsepsi perencanaan, pengukuran target kinerja serta implementasi SAKIP berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021.

C. Prestasi/Penghargaan

Penghargaan yang diterima oleh Sekretariat Daerah Kota Blitar pada Tahun 2025 secara mandiri maupun di tingkat kota sebagai pendukung perolehan penghargaan adalah sebagai berikut:

1. Penghargaan atas Pencapaian Memenuhi Kelengkapan Atribut pada Sembilan Variabel (9/9) untuk mencapai Kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif) yang diselenggarakan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
2. Piagam Apresiasi atas Pencapaian Memenuhi Keterisian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) di atas 60% yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia-LKPP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

3. Capaian Indeks Reformasi Hukum sebesar 98,70 masuk kategori AA (Istimewa) yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum
4. Penghargaan kepada Wali Kota Blitar sebagai Kepala Daerah dengan Dukungan dan Komitmen Penuh Pemerintah Kota Blitar dalam Upaya Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Umat yang diselenggarakan oleh BAZNAS Jawa Timur
5. Penghargaan kepada BAZNAS Kota Blitar, sebagai BAZNAS dengan sistem pendistribusian terbaik Kab/Kota se-Jawa Timur yang diselenggarakan oleh BAZNAS Jawa Timur
6. Pemerintah Kota Blitar melalui Kelurahan Pakunden memperoleh Juara 2 pada Lomba Gotong Royong Tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh DMPD Provinsi Jawa Timur
7. Mandaya Awards 2025, Menjadi 5 Kota Terbaik Aspek Pemberdayaan Masyarakat Kategori Kota yang diselenggarakan oleh Kementrian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia
8. Predikat SAKIP A "Memuaskan" nilai 81,19 yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB
9. Penghargaan Opini Ombudsman RI Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan Opini Kualitas Tertinggi dengan nilai 89,82
10. Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan nilai 4,69 kategori A atau Sangat Baik dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dipercayakan kepada Sekretaris Daerah Kota Blitar. LKj IP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Selain itu LKj IP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan analisis capaian kinerja dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Sasaran Strategis/Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2025 adalah:

1. Sasaran 1, Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan, capaian kinerja tahun 2025 adalah 116,67% atau Sangat Berhasil.
2. Sasaran 2, Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan, capaian kinerja tahun 2025 ini adalah 109,09% atau Sangat Berhasil.
3. Sasaran 3, Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi, capaian kinerja tahun 2025 adalah 100% atau Sangat Berhasil.
4. Sasaran 4, Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik, capaian kinerja tahun 2025 adalah 96,70% atau Sangat Berhasil
5. Sasaran 5, Meningkatnya kinerja perangkat daerah, capaian kinerja tahun 2025 adalah 97,04% atau Sangat Berhasil.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

Dari keseluruhan Sasaran Strategis/Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2025, capaian kinerja rata-rata sebesar 103,9% atau pada kategori **Sangat Berhasil**.

B. Langkah Perbaikan

Meskipun realisasi kinerja Sekretariat Daerah rata-rata telah mampu memenuhi target yang telah ditetapkan, namun masih didapati kendala atau permasalahan yang diperlukan langkah-langkah perbaikan dalam rangka pencapaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya yang digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut LKj IP Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Permasalahan/ kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
	SASARAN 1						
1	Belum optimalnya komitmen bersama dan persamaan persepsi antar stakeholder terkait implementasi kebijakan bidang keagamaan	a. Melaksanakan pendampingan lebih intensif terhadap fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	a. Terkumpulnya laporan realisasi hibah tempat ibadah dan lembaga keagamaan sesuai dengan ketentuan	✓	✓	✓
		b. Menyusun dan memonev rumusan kebijakan bidang bina mental spiritual masyarakat secara berkala		b. Terlaksananya penyusunan dan implementasi rumusan kebijakan bidang keagamaan	✓	✓	✓
		c. Mensosialisasikan kebijakan yang mendukung pembinaan mental spiritual masyarakat		c. Dilaksanakannya sosialisasi kebijakan keagamaan kepada masyarakat (guru ngaji, guru minggu, Lembaga keagamaan	✓	✓	✓

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
		d. Koordinasi lintas sektor atau antar stakeholder yang intensif guna penguatan komitmen dan penyamaan persepsi terkait implementasi kebijakan bidang keagamaan		d. Dilaksanakannya rapat koordinasi Bersama stakeholder keagamaan setiap tribulan	✓	✓	✓
	SASARAN 2						
1	Waktu perubahan pedoman program RT Keren yang terlalu berhimpitan dengan berakhirnya tahun anggaran 2025	Mengkoordinasikan perubahan program RT Keren menjadi Karya Mas	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan - Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya peningkatan sarana prasarana di kelurahan dalam rangka mendukung pencapaian SPM bidang pekerjaan umum	✓	✓	✓
2	Implementasi sebagian besar program RT Keren belum sesuai dengan rencana kebijakan Kepala Daerah terpilih	a. Menyusun rumusan kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan - Sub Kegiatan Pengelolaan	a. Tersusunnya rumusan kebijakan program Karya Mas sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah b. Tersusunnya laporan monev pelaksanaan	✓	✓	✓

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (peruba han)	Tahun 2027
		disesuaikan dengan program prioritas Kepala Daerah terpilih b. Melaksanakan monitoring pelaksanaan Karya Mas secara rutin dan berjenjang mulai dari lingkup kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota	Administrasi Kewilayahan	Karya Mas secara rutin dan berjenjang			
3	Kurang optimalnya identifikasi data sumber air tanah atau air sumur dan jaringan distribusi pelayanan air bersih atau perpipaan	Optimalisasi identifikasi data sumber air tanah atau air sumur dan jaringan distribusi layanan air bersih atau perpipaan	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Peningkatan jumlah Sambungan Rumah (SR)	✓	✓	✓
4	Kurang optimalnya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan	Optimalisasi Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan	a. Terlaksananya koordinasi yang intensif dengan BUMD dan	✓	✓	✓

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD serta Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD serta Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kebijakan Perekonomian - Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	BLUD b. Melakukan pengawasan secara rutin terkait kinerja BUMD dan BLUD c. Menginventarisir data UMKM dan ekraf dalam lingkup Kota Blitar			
5	Belum adanya peta kebijakan kesejahteraan rakyat yang bisa mendukung langsung pencapaian tujuan kesejahteraan sosial dan masyarakat	a. Lebih intensif melakukan koordinasi kepada instansi vertikal sebagai Pembina Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	a. Terlaksananya koordinasi yang intensif dengan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jatim	✓	✓	✓
		b. Meningkatkan koordinasi lintas OPD guna memfasilitasi perumusan kebijakan yang menjadi kewenangannya		b. Terlaksananya koordinasi lintas OPD yang intensif guna memfasilitasi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan	✓	✓	✓

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
		meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB serta Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas.		Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB serta Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas.			
6	Perlunya komitmen bersama dan persamaan persepsi antar stakeholder terkait implementasi rumusan kebijakan	Menyusun dan mensosialisasikan kebijakan yang mendukung kegiatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan	Terlaksananya penyusunan dan implementasi rumusan kebijakan bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	✓	✓	✓

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (peruba han)	Tahun 2027
	bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	masyarakat	Kesejahteraan Rakyat - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial				
7	Pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) digabung menjadi satu dalam Perwali LKK sehingga pengaturan masing-masing LKK kurang detail dan masih banyak permasalahan LKK yang belum diatur (rekomendasi LKj IP 2024 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun 2025)	Melaksanakan evaluasi pengaturan LKK sebagai bahan reviu apabila tidak sesuai dengan kondisi di lapangan	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan - Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Tersusunnya bahan reviu pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	✓	✓	✓
8	Jadwal rencana pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan oleh masing-masing PD belum dapat	Mewajibkan PD untuk mengentry paket pengadaan pada aplikasi SIRUP maksimal pada akhir Februari di tahun	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan	a. Minimal ≥ 85% Seluruh perangkat daerah sudah entry paket pengadaan pada aplikasi SIRUP di akhir Februari	✓	✓	✓

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
	dilaksanakan secara optimal dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran dengan kegiatan/paket pekerjaan perlu ditingkatkan agar realisasi anggaran terserap lebih optimal.	selanjutnya dan mendorong PD/Unit Kerja melaksanakan pengadaan sesuai dengan jadwal rencana pengadaan yang dientry pada SIRUP	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	b. Minimal $\geq 85\%$ RUP terumumkan sebesar 100% bagi seluruh perangkat daerah			
9	Belum tertibnya perangkat daerah dalam pencatatan realisasi PBJ dan tagging PDN pada LPSE.	Melaksanakan monev RUP, realisasi PBJ dan kepatuhan terhadap program P3DN secara berkala setiap Triwulan.	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	a. Minimal $\geq 60\%$ pencatatan realisasi PBJ pada LPSE b. Minimal $\geq 40\%$ pencatatan tagging PDN	✓	✓	✓
10	Dokumen perencanaan yang diajukan oleh Perangkat Daerah pada saat pengajian tender, setelah dilakukan review oleh Pokja yang dibantu	Mengirimkan surat penekanan untuk kepala PD agar segera menginventarisasi paket-paket pengadaan barang/jasa yang melalui UKPBJ dan segera mengajukan	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan	a. Minimal $\geq 85\%$ pelaksanaan paket pengadaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. b. Maksimal paket hasil	✓	✓	✓

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
	tenaga ahli ternyata memerlukan banyak penyesuaian. Hal ini disebabkan penyusunan dokumen perencanaan kurang teliti dan kurang konsisten dan hasil reviu persiapan PBJ oleh UKPBJ lama dikembalikan oleh OPD.	paket tersebut ke UKPBJ agar diproses pengadaannya.	Barang dan Jasa	revisi reviu dikembalikan setelah 5 hari pelaksanaan reviu			
11	Terdapat penyesuaian dengan kebijakan LKPP tentang penonaktifan katalog elektronik versi 5 sehingga perlu adanya adaptasi transaksi belanja PBJ melalui katalog elektronik versi 6	a. Monitoring kepada PD terkait pelaksanaan belanja PBJ pada katalog elektronik serta memfasilitasi penyedia yang ingin menayangkan produknya pada katalog elektronik b. Membuka klinik konsultasi di Bagian Layanan Pengadaan setiap hari pada jam kerja untuk	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	a. Minimal $\geq 25\%$ transaksi e-purchasing dilakukan melalui Katalog Versi 6 dalam periode monitoring b. Tersusunnya laporan monitoring berkala triwulan terkait penggunaan Katalog Versi 6 c. Meningkatnya jumlah penyedia lokal yang tayang pada Katalog Versi 6 (misalnya	✓	✓	✓

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
		mendampingi penyedia mulai dari konsultasi persyaratan pendaftar di LPSE, verifikasi akun LPSE sampai mendampingi proses input produk pada Katalog Elektronik.		meningkat $\geq 5\%$ dari baseline).			
12	Pelaksanaan Diklat Teknis/Fungsional dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional bagi PPBJ, menunggu jadwal dari LKPP	Mengikutsertakan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, personil UKPJB dan PPKom dalam Diklat Teknis/Fungsional dan Uji Kompetensi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LKPP.	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Minimal $\geq 95\%$ personal UKPBJ telah mengikuti Sertifikasi Kompetensi PBJ level 1	✓	✓	✓
	SASARAN 3						
1	Dinamika peraturan penerapan reformasi birokrasi (transisi implementasi RB	Menyusun renaksi RB tahun 2026 dan monev renaksi RB tahun 2025 berdasarkan	Menyusun renaksi RB tahun 2026 dan monev renaksi RB tahun 2025 berdasarkan PermenPAN	a. Tersusunnya monev renaksi RB tahun 2025 berdasarkan PermenPAN dan RB	✓	✓	✓

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
	menuju grand design RB Nasional 2025-2045)	PermenPAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 sambil menunggu ditetapkannya grand design RB Nasional 2025-2045	dan RB Nomor 9 Tahun 2023 sambil menunggu ditetapkannya grand design RB Nasional 2025-2045	Nomor 9 Tahun 2023 b. Tersusunnya renaksi RB tahun 2026 berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 sambil menunggu ditetapkannya grand design RB Nasional 2025-2045			
2	Perlunya re-komitmen implementasi SAKIP mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal pada seluruh jenjang jabatan	Pemanfaatan aplikasi SAKIP secara berkesinambungan dan menjadi budaya ASN	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya monev pemanfaatan aplikasi SAKIP secara berkala	✓	✓	✓
3	Dinamika peraturan kelembagaan yang belum pasti	Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait perkembangan kebijakan	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait perkembangan kebijakan kelembagaan	✓	✓	✓

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
4	Beberapa OPD belum tepat waktu dalam pelaporan tindak lanjut SKM tahun 2024	Diadakan monev pelaporan tindak lanjut SKM per tribulan	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya monev pelaporan tindak lanjut SKM per tribulan	✓	✓	✓
5	Beberapa OPD belum maksimal memanfaatkan aplikasi sukma-e	Diadakan monev pemanfaatan sukma-e dan pelaporan SKM per tribulan	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya monev pemanfaatan sukma-e dan pelaporan SKM per tribulan	✓	✓	✓

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
6	Masih ada beberapa OPD yang belum melaksanakan FKP	Sosialisasi kewajiban pelaksanaan FKP	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya sosialisasi kewajiban pelaksanaan FKP	✓	✓	✓
	SASARAN 4		-				
1	- Rendahnya validitas data yang disebabkan oleh pengisian instrument sukma-e yang kurang akuntabel oleh responden, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan persepsi publik yang objektif	Pada tahun 2026 perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh OPD untuk menindaklanjuti hasil SKM sesuai <i>time line</i> .	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan	Terlaksananya monev pelaporan tindak lanjut SKM per tribulan	✓	✓	✓

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (peruba han)	Tahun 2027
	- Beberapa OPD belum tepat waktu dalam pelaporan tindak lanjut SKM tahun 2024		Tata Laksana				
2	1. Belum tumbuhnya secara merata semangat memunculkan inovasi bagi perangkat daerah 2. Belum adanya komitmen bersama bahwa inovasi adalah sebuah kebutuhan	1. Mengkoordinasikan ke Bapperinda selaku Pembina inovasi agar menyusun regulasi yang mewajibkan bagi Perangkat Daerah untuk menciptakan 1 atau 2 inovasi setiap tahun 2. Mengkoordinasikan ke Bapperinda untuk melakukan pembinaan rutin bersama Bagian Organisasi setiap tribulan untuk memonev pelaksanaan inovasi masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1. Terlaksananya koordinasi penyusunan regulasi kewajiban penciptaan inovasi Perangkat Daerah 2. Terlaksananya koordinasi pembinaan pelaksanaan inovasi Perangkat Daerah	✓	✓	✓

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
3	BAGIAN PEMERINTAHAN						
1	Perlunya pembenahan menyeluruh pada tata kelola waktu pelayanan	Evaluasi dan penyederhanaan SOP pelayanan untuk menghilangkan tahapan yang tidak efektif	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan - Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	a. Meningkatnya nilai kepuasan masyarakat pada unsur waktu; b. terselesaikannya penyusunan kebijakan Karya Mas tepat waktu c. Tersusunnya monev pelaksanaan Kaya Mas tepat waktu	✓		✓
2	Kesesuaian antara produk yang diterima masyarakat dengan standar spesifikasi yang ditetapkan masih perlu diperkuat.	Penyusunan dokumen standar spesifikasi produk yang jelas, terukur dan mudah dipahami oleh masyarakat	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan - Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Tersusunnya Standar Pelayanan koordinasi pelaksanaan program Karya Mas	✓		✓
3	Sarana prasarana pelayanan dinilai cukup memadai, namun memerlukan peningkatan secara bertahap dan	Peningkatan kebersihan, keamanan, dan estetika ruang layanan sebagai bagian dari budaya pelayanan prima	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan - Sub Kegiatan Pengelolaan	Meningkatnya estetika ruang layanan		✓	✓

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
	berkelanjutan		Administrasi Kewilayahan				
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA				✓	✓	✓
1	Perlunya pembenahan menyeluruh pada tata kelola waktu pelayanan	Penetapan dan publikasi standar waktu pelayanan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pencairan insentif guru ngaji dan guru minggu tepat waktu	✓	✓	✓
2	Kesesuaian antara produk yang diterima masyarakat dengan standar spesifikasi yang ditetapkan OPD masih perlu diperkuat.	Monitoring dan evaluasi kesesuaian produk secara berkala untuk menjamin mutu dan kepastian hasil yang diterima masyarakat	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Produk layanan PDAM yang diterima masyarakat sesuai dengan standar	✓	✓	✓

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
3	Sarana prasarana pelayanan dinilai cukup memadai, namun memerlukan peningkatan secara bertahap dan berkelanjutan	a. Inventarisasi dan pemetaan kondisi sarana prasarana sebagai dasar perencanaan perbaikan dan penganggaran b. Peningkatan kebersihan, keamanan, dan estetika ruang layanan sebagai bagian dari budaya pelayanan prima	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	a. Terinventarisasinya sarpras yang memadai b. Meningkatnya estetika ruang layanan	✓	✓	✓
	BAGIAN HUKUM						

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
1	Perlunya pembenahan menyeluruh pada tata kelola waktu pelayanan	a. Evaluasi dan penyederhanaan SOP pelayanan untuk menghilangkan tahapan yang tidak efektif b. Penataan ulang pembagian tugas dan jam pelayanan petugas, khususnya pada jam sibuk	- Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat - Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	d. Meningkatnya nilai kepuasan masyarakat pada unsur waktu; e. terselesaikannya penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan SOP penyusunan produk hukum daerah;	✓	✓	✓
2	Sarana prasarana pelayanan dinilai cukup memadai, namun memerlukan peningkatan secara bertahap dan berkelanjutan	a. Inventarisasi dan pemetaan kondisi sarana prasarana sebagai dasar perencanaan perbaikan dan penganggaran	- Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat - Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	a. Terinventarisasinya sarpras yang memadai	✓		
		b. Pemeliharaan rutin serta penataan ulang ruang pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi		b. Terlaksananya penataan ulang ruang pelayanan yang nyaman	✓		
		c. Pengadaan dan		c. Tersedianya	✓		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
		penambahan sarana pendukung pelayanan, termasuk fasilitas aksesibilitas bagi kelompok rentan		penambahan sarpras pendukung pelayanan d. Tersedianya fasilitas aksesibilitas bagi kelompok rentan			✓
	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA						
1	Perlunya pembenahan menyeluruh pada tata kelola waktu pelayanan	Penetapan dan publikasi standar waktu pelayanan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat/OPD/ stakeholder terkait	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Penyelesaian paket pengadaan sesuai dengan perencanaan			
2	Sarana prasarana pelayanan dinilai cukup memadai, namun memerlukan peningkatan secara bertahap dan berkelanjutan	a. Inventarisasi dan pemetaan kondisi sarana prasarana sebagai dasar perencanaan perbaikan dan penganggaran	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	a. Terinventarisasinya sarpras yang memadai	✓	✓	✓
		b. Pemeliharaan rutin serta penataan ulang ruang		b. Terlaksananya penataan ruang pelayanan yang nyaman	✓	✓	✓

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
		pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi		dan efisien			
		c. Pengadaan dan penambahan sarana pendukung pelayanan, termasuk fasilitas aksesibilitas bagi kelompok rentan		c. Tersedianya penambahan sarpras pendukung pelayanan	✓	✓	✓
		d. Peningkatan kebersihan, keamanan, dan estetika ruang layanan sebagai bagian dari budaya pelayanan prima		d. Meningkatnya estetika ruang layanan	✓	✓	✓
	BAGIAN ORGANISASI						
1	Perlunya pembenahan menyeluruh pada tata kelola waktu pelayanan	Penetapan dan publikasi standar waktu pelayanan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat/OPD	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan	Pelayanan konsultasi, koordinasi, pendampingan/desk diberikan sesuai dengan standar pelayanan khususnya unsur ketepatan waktu	✓		✓

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
			Tata Laksana - Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan RB - Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				
2	Kesesuaian antara produk yang diterima masyarakat dengan standar spesifikasi yang ditetapkan OPD masih perlu diperkuat.	Monitoring dan evaluasi kesesuaian produk secara berkala untuk menjamin mutu dan kepastian hasil yang diterima masyarakat/OPD	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana - Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan RB - Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pelayanan konsultasi, koordinasi, pendampingan/desk diberikan sesuai dengan standar pelayanan khususnya unsur produk spesifikasi	✓	✓	✓
	BAGIAN UMUM						
1	Perlunya pembenahan	a. Evaluasi dan penyederhanaan SOP pelayanan	- Program penunjang urusan pemerintahan	a. Meningkatnya nilai kepuasan masyarakat pada unsur waktu	✓	✓	✓

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
	menyeluruh pada tata kelola waktu pelayanan	untuk menghilangkan tahapan yang tidak efektif	daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
		b. Penetapan dan publikasi standar waktu pelayanan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat		b. Layanan surat menyurat terlaksana sesuai dengan urutan prioritas atau sifat surat	✓	✓	✓
		c. Penataan ulang pembagian tugas dan jam pelayanan petugas, khususnya pada jam sibuk		c. Terelesaiannya pelayanan surat menyurat sesuai dengan SOP	✓	✓	✓
		d. Pengembangan dan optimalisasi sistem antrian atau layanan berbasis digital guna mempercepat proses pelayanan		d. Tersedianya sistem antrian atau layanan surat menyurat berbasis digital		✓	
2	Sarana prasarana pelayanan dinilai cukup memadai, namun	a. Inventarisasi dan pemetaan kondisi sarana prasarana sebagai dasar perencanaan	- Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	a. Terinventarisasinya sarpras yang memadai	✓		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
	memerlukan peningkatan secara bertahap dan berkelanjutan	perbaikan dan penganggaran	- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		b. Pemeliharaan rutin serta penataan ulang ruang pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi		b. Terlaksananya pemeliharaan rutin ruang pelayanan	✓	✓	✓
		c. Pengadaan dan penambahan sarana pendukung pelayanan, termasuk fasilitas aksesibilitas bagi kelompok rentan		c. Tersedianya penambahan sarpras pendukung pelayanan	✓	✓	✓
		d. Peningkatan kebersihan, keamanan, dan estetika ruang layanan sebagai bagian dari budaya pelayanan prima		d. Tersedianya fasilitas aksesibilitas bagi kelompok rentan		✓	
				e. Meningkatnya estetika ruang layanan	✓	✓	✓
	SASARAN 5						

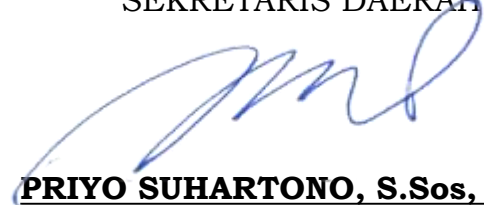
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Permasalahan/ kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
1	Belum menyajikan permasalahan/kendala dan rekomendasi/tindak lanjut dalam pengukuran kinerja	Pengukuran kinerja TB 3 tahun 2025 dan seterusnya akan menyajikan permasalahan/kendala dan rekomendasi/tindak lanjut	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pengukuran kinerja TB 3 tahun 2025 dan seterusnya telah menyajikan permasalahan/kendala dan rekomendasi/tindak lanjut	✓	✓	✓
2	Dokumen pendukung penyajian informasi dalam laporan kinerja agar mencakup seluruh pegawai menengah	Melengkapi dokumen pendukung penyajian informasi dalam laporan kinerja yang mencakup seluruh pegawai	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dalam penyusunan dan penyajian laporan kinerja telah melibatkan seluruh pegawai	✓		

Blitar, 27 Februari 2026



SEKRETARIS DAERAH



PRIYO SUHARTONO, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 196712241989031005

LAMPIRAN I

MATRIKS RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH TAHUN

2021-2026

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

MATRIKS RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 - 2026

VISI : Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT
MISI : 1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
5. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Infor

RPJMD KOTA BLITAR						RENCANA STRATEGIS															UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	
MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SATUAN	TARGET 2025	SASARAN RPJMD	TUJUAN						SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN					
						TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN	FORMULA PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM
										2020	2025					2020	2025					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadi an dalam Kebudayaan	Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	88,68	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) pada tahun bersangkutan	Indeks	84,38	85.540	Meningkatnya kualitas keajahteraan penyelenggara an pemerintahan	Persentase Kebijakan keajahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	Jumlah kebijakan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan keajahteraan rakyat bidang keagamaan x 100%	100%	100%	Peningkatan efektifitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah	Peningkatan Fasilitasi dan koordinasi penyusunan kebijakan keajahteraan rakyat bidang keagamaan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Meningkat nyakualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	90,41	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah an daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah an daerah	1. Nilai SAKIP	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN RB	Nilai	BB (72,06)	A (80,11)	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan movey atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	Jumlah OPD yang telah melakukan money atas perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik) dibagi jumlah seluruh OPD x 100%	34,48%	86,21%	Penguatan kelembagaan berbasis kinerja	Penguatan pendampingan dan pembinaan OPD dalam Implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	BAGIAN ORGANISASI		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

							2. Persentase Kepala OPD yang paham atas penerapan “Good Governance” penerapan “Good Governance”	Jumlah Kepala OPD yang paham atas penerapan “Good Governance” dibagi jumlah seluruh Kepala OPD x 100% (penghitungan didasarkan pada: 1. Adanya dialog kinerja untuk menyelaraskan kinerja pimpinan dengan setiap jabatan 2. Penetapan kinerja individu (SKP) Jafung dan Pelaksana berdasarkan Matriks Peran Hasil dan Matriks Peran Hasil selaras/mengacu pada cascading kinerja)	Persen	NA	66,67%										
							3. Status EKPPD	Penilaian atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Kemendagri	Nilai	Sangat Tinggi (3,3527)	Sangat Tinggi (3,474)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100 %	100%	100%	Peningkatan efektifitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah	Penyusunan Peta Kebijakan Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
																		Peningkatan Fasilitasi dan koordinasi pengendalian kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat			
																		Peningkatan Fasilitasi dan koordinasi pengendalian kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BAGIAN PEMERINTAHAN	
																			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	BAGIAN PEMERINTAHAN	
																		Fasilitasi pemenuhan kualitas produk hukum daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BAGIAN HUKUM	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

																	Peningkatan Fasilitas dan koordinasi pengendalian kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
																	Peningkatan kapasitas BUMD dan BLUD	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
												2. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan / Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum x 100%	100%	100%	Peningkatan efektifitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah	Penyusunan Peta Kebijakan Daerah Peningkatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	
						Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun bersangkutan	Nilai	BAIK (82,39)	SANGAT BAIK (89,40)	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	Jumlah OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM pada tahun bersangkutan / Jumlah OPD x 100%	10,34%	100%	Peningkatan sistem penyelenggaraan pelayanan public	Penguatan pembinaan OPD penyelenggara Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	BAGIAN ORGANISASI
							Persentase OPD yang telah mempunyai inovasi pelayanan publik terintegrasi	Jumlah OPD yang telah mempunyai inovasi pelayanan publik terintegrasi dibagi jumlah OPD x 100% (penghitungan akumulasi didasarkan pada: 1. Inovasi Perangkat Daerah yang ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik (sesuai obyek yang dilayani sehingga lebih efektif dan efisien 2. Inovasi Perangkat Daerah yang mampu menggambarkan kolaborasi peran dengan Perangkat Daerah/Instansi lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik)	Persen	NA	35%		2. Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	Jumlah inovasi tahun n – tahun n – 1 dibagi inovasi tahun n – 1 x100%	NA	25%				

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

													3. Nilai rata-rata SKM Setda	(Nilai SKM layanan pada Bagian Pemerintahan + Nilai SKM layanan pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat + Nilai SKM layanan pada Bagian Hukum+Nilai SKM layanan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa + Nilai SKM layanan pada Bagian Organisasi + Nilai SKM layanan pada Bagian Umum) / 6	NA	SANGAT BAIK (89,00)			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	BAGIAN UMUM
						Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	Nilai	A (83,99)	A (89,00)	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	A (83,99)	A (89,00)	Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah	Penyempurnaan penyusunan dan penerapan dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. BAGIAN ORGANISASI BAGIAN UMUM

LAMPIRAN II RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2025

- Tujuan : 1. Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
4. Meningkatnya tata kelola perangkat daerah

- Indikator : 1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Target : 85,54
2. Nilai SAKIP Target : A (80,11)
3. Status EKPPD Target : Tinggi (3,4740)
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Target : Sangat Baik (89,28)
5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah Target : A (89,00)

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan dibagi	100%	PROGRAM PEMERIN TAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	100 %	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	6 rumusan kebijakan	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	25 dokumen	8.959.037.836

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
			jumlah seluruh kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan x 100 %			i			i					
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100 %	100%	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 %	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 %	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 dokumen	315.512.500
						Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	100 %		Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	100 %				933.453.490
									Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan	100 %				
									Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi	100 %				448.402.700

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
									daerah yang terfasilitasi			Pelaksanaan Otonomi Daerah		
								Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	83,33 %	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	8 dokumen	148.568.200
					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	85,71 %	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	21 kelurahan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa Dan Kelurahan	21 dokumen	22.000.000
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	100 %	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	100 %	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	320 dokumen	180.655.840

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
											Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 kasus	322.375.900
											Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasikan	70 dokumen	206.009.100
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	4 rumusan kebijakan	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	2 dokumen	52.496.100

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
												Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		
											Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 dokumen	240.003.969
					PROGRAM PEREKONOMIAN	Persentase rumusan kebijakan	100 %	Pelaksanaan Kebijakan	Jumlah rumusan kebijakan	6 rumusan kebijakan	Koordinasi, Sinkronisasi	Jumlah Dokumen Hasil	2 dokumen	283.295.974

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
					DAN PEMBANGUNAN	bidang perekonomian yang ditindaklanjuti		Perekonomian	bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	jaka n	si, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		
											Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 laporan	89.427.230
											Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 dokumen	44.926.000
								Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	2 dok ume n	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan	2 dokumen	200.000.426

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
												Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja			
		2. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan/ Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum x 100%	100%	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	10 baha n kebi jaka n	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	6 dokumen	19.668.000	
											Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	16 laporan	90.688.400	
						Persentase pengadaan barang dan jasa melalui <i>E-Procurement</i>	76,6 7 %	Pengelolaan Pengadaaan Barang dan Jasa	SKM Layanan UKPBj	BAIK 83,00	Nilai	Pengelolaan Pengadaaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaaan Barang dan Jasa	80 dokumen	211.697.175
									Jumlah Variabel kematangan UKPBj yang telah mencapai	7	Nilai	Pengelolaan Layanan Pengadaaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaaan Secara	2 dokumen	89.307.614

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
									Level 3 (Proaktif)					
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	Jumlah OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik) dibagi jumlah seluruh OPD x 100%	86,21%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	86,21 %	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	26 OPD	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 dokumen	159.557.900
											Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 dokumen	171.577.003
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 dokumen	8.168.300

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
											Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 laporan	230.039.812
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	Jumlah OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM pada tahun bersangkutan / Jumlah OPD x 100%	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	41,38 %	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	26 OPD	Monitorin g, Evaluasi dan Pengendalian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian	3 dokumen	5.000.000
		2. Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	(Jumlah inovasi tahun n – tahun n – 1 dibagi inovasi tahun n – 1 x 100%) Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau	39,13%							Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
			adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat/pengguna layanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.											
	3. Nilai rata-rata SKM Setda	(Nilai SKM layanan pada Bagian Pemerintahan + Nilai SKM layanan pada Bagian	SANGAT BAIK (89,00)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai	100 %	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	100 %	<u>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</u>	<u>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</u>	2 dokumen	2.200.000	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
			Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat + Nilai SKM layanan pada Bagian Hukum + Nilai SKM layanan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa + Nilai SKM layanan pada Bagian Organisasi + Nilai SKM layanan pada Bagian Umum) / 6		KABUPATEN/ KOTA	standar/ketentuan yang berlaku					Daerah SKPD			
											Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	2.200.000
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	808.029.273
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	441.000
											Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	1.161.198.462

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
											Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 laporan	205.272.553
											Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan	3.552.593.060
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	388.888.508

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
											Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 unit	543.676.808
											Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	118 unit	220.101.500
											Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	1.171.311.999,99
								Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	2 orang/ bulan	239.715.981

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
								Kepala Daerah			Daerah	Daerah		
											Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	23 paket	138.721.600
											Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	6.000.000
											Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	600.000.000
								Fasilitasi Kerumahta	Persentase fasilitas	100 %	Penyediaan	Jumlah Paket	4 paket	2.547.181.201

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
								nggaan Sekretariat Daerah	kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di laksanakan		Kebutuham Rumah Tangga Kepala Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		
											Penyediaan Kebutuham Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 paket	1.508.447.596
											Penyediaan Kebutuham Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 paket	301.691.200
								Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitas Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	80 %	Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	33 laporan	1.456.505.005
											Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	400 laporan	11.700.000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
											Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3.055 laporan	100.391.200
								Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	65.626.275
5	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun	A (89,00)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	SANGAT BAIK (89)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu	100 %	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dokumen	7.854.000
											Koordinasi dan	Jumlah Laporan	6 laporan	5.500.000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI bersangkutan	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
											Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	100 %	Sosialisasi Peraturan Perundangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	84 orang	70.550.000
											<u>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nya</u>	<u>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</u>	6 paket	26.250.000
								Administrasi Umum Perangkat	Persentase ketersediaan administrasi	100 %	Penyediaan Komponen	Jumlah Paket Komponen	1 paket	75.885.391

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
								Daerah	umum perangkat daerah sesuai standar		n Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan		
											Penyediaa n Peralatan dan Perlengka pan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediakan	7 paket	99.394.200
											Penyediaa n Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	23.185.900
											Penyediaa n Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	170 paket	992.958.430
											Penyediaa n Barang Cetakan dan Penggand aan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	26.893.800
											Penyediaa n Bahan Bacaan	Jumlah Dokumen Bahan	24 dokumen	66.675.000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

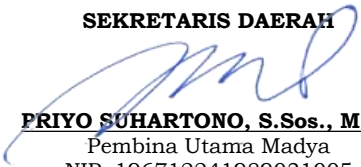
NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
											dan Peraturan Perundangan-undangan	Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 laporan	374.527.400
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 orang	14.570.483.230,01
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se	4 laporan	1.650.000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
													mesteran SKPD	
	TOTAL PAGU													44.900.196.542

Blitar, 20 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH


PRIYO SUHARTONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196712241989031005

LAMPIRAN III PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PRIYO SUHARTONO S.Sos.,M.Si.**

Jabatan : **Sekretaris Daerah**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.**

Jabatan : **Walikota Blitar**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Walikota Blitar,
SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.


Blitar, 20 Oktober 2025
Sekretaris Daerah
Kota Blitar,
PRIYO SUHARTONO S.Sos.,M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196712241989031005

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	100.00(persen)
		Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	39.13(Persen)
		Nilai rata - rata SKM Setda	89.00(Indeks)
2	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	86.21(Persen)
3	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100.00(Persen)
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100.00(Persen)
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100.00(Persen)
5	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89.00(Nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
A	Bagian Pemerintahan		
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	22,000,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1,845,936,890.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	jumlah	1,867,936,890.00	
B	Bagian Hukum		
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	709,040,840.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	jumlah	709,040,840.00	
C	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat		
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9,251,537,905.00	Pendapatan Bagi Hasil
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	617,649,630.00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), Pendapatan Bagi Hasil
	jumlah	9,869,187,535.00	
D	Bagian Umum		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31,263,546,573.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	jumlah	31,263,546,573.00	
E	Bagian Organisasi		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	684,497,015.00	Pendapatan Bagi Hasil
	jumlah	684,497,015.00	
F	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa		
1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	505,987,689.00	Pendapatan Bagi Hasil
	jumlah	505,987,689.00	
Total:		44,900,196,542.00	


 Syariful MUHIBBIN, S.H.I.


 Blitar, 30 Oktober 2025
 Sekretaris Daerah
 Kota Blitar,
 SUHARTONO S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 196712241989031005

LAMPIRAN IV PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (RP)	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan Kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan x 100%	100%	100%	100%	Permasalahan: Belum optimalnya komitmen bersama dan persamaan persepsi antar stakeholder terkait implementasi kebijakan bidang keagamaan RTL: 1) Melaksanakan pendampingan lebih intensif terhadap fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual 2) Menyusun dan memonev rumusan kebijakan bidang bina mental spiritual masyarakat secara berkala 3) Mensosialisasikan kebijakan yang mendukung pembinaan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (BAGIAN PEREKONOMI AN DAN KESRA)	8.959.037.836,00	8.708.678.844,00	97,20%	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

							mental spiritual masyarakat					
							4) Koordinasi lintas sektor atau antar stakeholder yang intensif guna penguatan komitmen dan penyamaan persepsi terkait implementasi kebijakan bidang keagamaan					
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100%	100%	118,18%	95,04 %	PEMERINTAHAN Permasalahan: 1) Waktu perubahan pedoman program RT Keren yang terlalu berhimpitan dengan berakhirnya tahun anggaran 2025 2) Implementasi sebagian besar program RT Keren belum sesuai dengan rencana kebijakan Kepala Daerah terpilih RTL: 1) Mengkoordinasikan perubahan program RT Keren menjadi Karya Mas	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (BAGIAN PEMERINTAHAN)	1.845.936.890,00	1.731.796.445,00	93,81%	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

					2) Menyusun rumusan kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan program prioritas Kepala Daerah terpilih 3) Melaksanakan monitoring pelaksanaan Karya Mas secara rutin dan berjenjang mulai dari lingkup kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota					
						Program Administrasi Pemerintahan Desa (BAGIAN PEMERINTAHAN)	22.000.000,00	21.450.000,00	97,5%	
						Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (BAGIAN HUKUM)	709.040.840,00	672.365.233,00	94,82%	
					PEREKONOMIAN Permasalahan: 1) Kurang optimalnya identifikasi data sumber	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (BAGIAN	292.500.069,00	197.121.512,00	67,38%	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

				air tanah atau air sumur dan jaringan distribusi layanan air bersih atau perpipaan 2) Kurang optimalnya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD serta Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil RTL: 1) Optimalisasi identifikasi data sumber air tanah atau air sumur dan Jaringan distribusi layanan air bersih atau perpipaan 2) Merumuskan kebijakan tentang 3) Optimalisasi Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD serta Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi	PEREKONOMI AN DAN KESRA)			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

					Mikro kecil KESRA Permasalahan: 1) Belum adanya peta kebijakan kesejahteraan rakyat yang bisa mendukung langsung pencapaian tujuan kesejahteraan sosial dan masyarakat 2) Perlunya komitmen bersama dan persamaan persepsi antar stakeholder terkait implementasi rumusan kebijakan bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat RTL: 1) Lebih intensif melakukan koordinasi kepada instansi vertikal sebagai Pembina Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat serta meningkatkan koordinasi lintas OPD guna			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

						memfasilitasi perumusan kebijakan yang menjadi kewenangannya meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB serta Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas.					
						2) Menyusun dan mensosialisasi kebijakan yang mendukung kegiatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat					
							Program Perekonomian dan	617.649.630,00	542.189.514,00	87,78%	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

							Pembangunan (BAGIAN PEREKONOMI AN DAN KESRA)				
4)	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan / Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum x 100%	100%	100%	100%	Permasalahan: 1) Jadwal rencana pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan oleh masing-masing PD belum dapat dilaksanakan secara optimal dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran dengan kegiatan/ paket pekerjaan perlu ditingkatkan agar realisasi anggaran terserap lebih optimal. 2) Belum tertibnya perangkat daerah dalam pencatatan realisasi PBJ dan tagging PDN pada LPSE 3) Dokumen perencanaan yang diajukan oleh Perangkat Daerah pada saat pengajian tender, setelah dilakukan	Program Perekonomian dan Pembangunan (BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA)	505.987.689,00	696.665.395,00	94,25%	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

							review oleh Pokja yang dibantu tenaga ahli ternyata memerlukan banyak penyesuaian. Hal ini disebabkan penyusunan dokumen perencanaan kurang teliti dan kurang konsisten dan hasil reuiu persiapan PBJ oleh UKPBJ lama dikembalikan oleh OPD. 4) Terdapat penyesuaian dengan kebijakan LKPP tentang penonaktifan katalog elektronik versi 5 sehingga perlu adanya adaptasi transaksi belanja PBJ melalui katalog elektronik versi 6 5) Pelaksanaan Diklat Teknis/Fungsional dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional bagi PPBJ, menunggu jadwal dari				
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

							LKPP RTL: 1) Mewajibkan PD untuk mengentry paket pengadaan pada aplikasi SIRUP maksimal pada akhir Februari di tahun selanjutnya dan mendorong PD/Unit Kerja melaksanakan pengadaan sesuai dengan jadwal rencana pengadaan yang dientry pada SIRUP 2) Melaksanakan monev RUP, realisasi PBJ dan kepatuhan terhadap program P3DN secara berkala setiap Triwulan 3) Mengirimkan surat penekanan untuk kepala PD agar segera menginventari sasi paket-paket pengadaan barang/jasa yang melalui UKPBJ dan segera mengajukan			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

							paket tersebut ke UKPBJ agar diproses pengadaannya 4) Monitoring kepada PD terkait pelaksanaan belanja PBJ pada katalog elektronik serta memfasilitasi penyedia yang ingin menayangkan produknya pada katalog elektronik. 5) Membuka klinik konsultasi di Bagian Layanan Pengadaan setiap hari pada jam kerja untuk mendampingi penyedia mulai dari konsultasi persyaratan pendaftar di LPSE, verifikasi akun LPSE sampai mendampingi proses input produk pada Katalog Elektronik. 6) Mengikutsertakan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, personil UKPJB dan				
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

							PPKom dalam Diklat Teknis/Fungsional dan Uji Kompetensi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LKPP.					
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	Jumlah OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik) dibagi jumlah seluruh OPD x 100%	86,21%	86,21%	100%	Permasalahan: 1) Dinamika peraturan penerapan reformasi birokrasi (transisi implementasi RB menuju grand design RB Nasional 2025-2045) 2) Perlunya re-komitmen implementasi SAKIP mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal pada seluruh jenjang jabatan 3) Dinamika peraturan kelembagaan yang belum pasti 4) Beberapa OPD belum tepat waktu dalam pelaporan tindak lanjut SKM tahun 2024 5) Beberapa OPD belum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BAGIAN ORGANISASI)	339.303.203,00	338.118.431,00	99,65%	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

							maksimal memanfaatkan aplikasi sukma-e 6) Masih ada beberapa OPD yang belum melaksanakan FKP RTL: 1) Menyusun renaksi RB tahun 2026 dan monev renaksi RB tahun 2025 berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 sambil menunggu ditetapkannya grand design RB Nasional 2025-2045 2) Pemanfaatan aplikasi SAKIP secara berkesinambungan dan menjadi budaya ASN 3) Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait perkembangan kebijakan 4) Diadakan monev pelaporan tindak lanjut SKM per tribulan					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

							5) Diadakan monev pemanfaatan sukma-e dan pelaporan SKM per tribulan 6) Sosialisasi kewajiban pelaksanaan FKP					
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	Jumlah OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM pada tahun bersangkutan / Jumlah OPD x 100%	100%	100%	100%	Permasalahan: 1) Rendahnya validitas data yang disebabkan oleh pengisian instrument sukma-e yang kurang akuntabel oleh responden, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan persepsi publik yang objektif 2) Beberapa OPD belum tepat waktu dalam pelaporan tindak lanjut SKM tahun 2024 RTL: Pada tahun 2026 perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh OPD untuk menindaklanjuti hasil SKM sesuai time line	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (BAGIAN ORGANISASI)	253.039.812,00	198.735.613,00	84,55%	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

		2. Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	(Jumlah inovasi tahun n – tahun n – 1 dibagi inovasi tahun n – 1 x 100%) Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat/pengguna layanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.	39,13%	33,33%	85,18 %	Permasalahan: 1) Belum tumbuhnya secara merata semangat memunculkan inovasi bagi perangkat daerah 2) Belum adanya komitmen bersama bahwa inovasi adalah sebuah kebutuhan RTL: 1) Mengkoordinasikan ke Bapperinda selaku Pembina inovasi agar menyusun regulasi yang mewajibkan bagi Perangkat Daerah untuk menciptakan 1 atau 2 inovasi setiap tahun 2) Mengkoordinasikan ke Bapperinda untuk melakukan pembinaan rutin bersama Bagian Organisasi setiap tribulan untuk memonev pelaksanaan inovasi masing-masing Perangkat Daerah/Unit					
--	--	--	---	--------	--------	---------	--	--	--	--	--	--

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

							Kerja					
		3. Nilai rata - rata SKM Setda	(Nilai SKM layanan pada Bagian Pemerintahan + Nilai SKM layanan pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat + Nilai SKM layanan pada Bagian Hukum + Nilai SKM layanan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa + Nilai SKM layanan pada Bagian Organisasi + Nilai SKM layanan pada Bagian Umum) / 6	Sangat Baik (89,00)	Sangat Baik (93,38)	104,92 %	Dari 9 unsur SKM dengan 3 nilai terendah yakni waktu layanan, produk spesifikasi jenis pelayanan dan sarpras sehingga pada tribulan I tahun 2026 perlu dilakukan perbaikan yaitu mempercepat waktu pelayanan, menyediakan tempat atau ruangan khusus pelayanan, melengkapi peralatan dan infrastruktur pelayanan, serta membuat standarisasi prosedur output, pelatihan verifikasi kualitas, dan pemanfaatan teknologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BAGIAN UMUM)	15.031.893.221,99	14.540.733.578,00	96,73%	
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	A (89,00)	A (86,37)	97,04 %	Nilai SAKIP Setda Tahun 2025 adalah 86,37 atau masuk kategori memuaskan. Namun beberapa hal perlu untuk di TL yakni	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BAGIA ORGANISASI DAN BAGIAN UMUM)	16.341.807.351,01	15.029.784.205,00	91,97%	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

							(1) Pengukuran kinerja TW 3 tahun 2025 yang menyajikan permasalahan/rekomendasi/rencana tindak lanjut (2) Dokumen pendukung penyajian informasi dalam laporan kinerja yang mencakup seluruh pegawai					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Blitar, 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH

PRIYO SUHARTONO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 196712241989031005